LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(LPPM)
UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI
Jl. Ikan Tongkol 01, Banyuwangi 68416. Telp. (0333) 4466937
web : www.unibabwi.ac.id
email : lppm@unibabwi.ac.id

SURAT KETERANGAN KEABSAHAN KARYA ILMIAH
Nomor : 146/Ka.LPPM/F-6/UNIBA/V/2022

Hari ini Selasa, tanggal 17 Mei 2022 telah dilakukan pengecekan atas karya ilmiah sebagai berikut.

Jenis Karya Ilmiah	: Buku Referensi
Judul Karya Ilmiah	: Desa Kebangsaan di Kecamatan Blimbingsari Studi Kebangsaan di Kecamatan Blimbingsari
Penulis	: Agus Mursidi, Bayu Indra Permana
Tahun Terbit	: 2020
Jumlah Halaman	: 75 halaman
ISBN	: 978-623-91917-3-3

Adapun hasil pengecekan kemiripan terhadap karya ilmiah tersebut dilakukan dengan perangkat **TURNITIN** menunjukkan hasil **30%** (hasil terlampir).

Demikian surat ini diberikan untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, 18 Mei 2022
a.n. Kepala LPPM,
Sekretaris LPPM,

Reny Eka Evi Susanti, M.Pd.
NIDN. 0708099001

Dipindai dengan CamScanner

Desa Kebangsaan

by Lppm Agus Mursidi

Submission date: 17-May-2022 10:08PM (UTC-0700)
Submission ID: 1838879759
File name: BUKU_DESA_KEBANGSAAN_KECAMATAN_BLIMBINGSARI.pdf (1.04M)
Word count: 21862
Character count: 142102

Dr. Agus Mursidi, M.Pd
Bayu I. Permana, M.Pd

RISTEKDIKTI

DESA KEBANGSAAN DI KECAMATAN BLIMBINGSARI

Studi Kebangsaan di Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi

Judul

DESA KEBANGSAAN DI KECAMATAN BLIMBINGSARI
STUDI KEBANGSAAN DI KECAMATAN BLIMBINGSARI
KABUPATEN BANYUWANGI

Penulis:

Dr. Agus Mursidi, M.Pd
Bayu Indra Permana, M.Pd

Cetakan :

Pertama, September 2020

ISBN: 978-623-91917-3-3

ISBN 978-623-91917-3-3

9 786239 191733

Penertbit:
Utan Kayu Publising
utankayu.publishing@gmail.com
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PGRI BANYUWANG
2020

DESA KEBANGSAAN DI KECAMATAN BLIMBINGSARI

STUDI KEBANGSAAN DI KECAMATAN BLIMBINGSARI

KABUPATEN BANYUWANGI

Penyusun:
Dr. Agus Mursidi, M.Pd
Bayu Indra Permana, M.Pd

Layout:
Penerbit Utan Kayu

Desain sampul:
Penerbit Utan Kayu

ISBN: 978-623-91917-3-3

Cetakan pertama, November 2020
Ukuran: 20x29 cm
Jumlah: 75 halaman

Hak cipta © 2020 pada penulis,
Hak cipta dilindungi Undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, secara elektronis maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.

Dicetak dan diterbitkan oleh:
Penerbit Utan Kayu
Jl. Lucky Arya Residence No 18 Fajar Agung Barat Kecamatan Pringsewu Jl. Hos. Cokroaminoto Pringsewu
Telp. : (+62) 81325790254
Fax. : (0729) 7081587
Email : utankayu.publishing@gmail.com

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, atas karunia-Nya dengan berbagai kemudahan yang telah diberikan sehingga penulisan buku ini dapat dilaksanakan dengan lancar.

Ucapan terimakasih disampaikan kepada berbagai pihak yang telah membantu pelaksanaan penelitian ini, khususnya kepada:

1. DRPM RISTEKDIKTI yang telah memberikan kesempatan untuk mendapatkan hibah penelitian dosen pemula
2. Dr. H. Sadi, M.M. selaku rektor Universitas PGRI Banyuwangi yang telah memberikan kesempatan kepada semua dosen untuk terus berkarya;
3. Rachmaniah Mirza, M.Pd., selaku Ketua LPPM Universitas PGRI Banyuwangi;
4. Dr. Agus Mursidi, M.Pd Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Banyuwangi.
5. Segenap civitas akademika Universitas PGRI Banyuwangi, khususnya Prodi Sejarah dan Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengumpulan data dan penulisan buku ini .

Laporan ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan untuk perbaikan penelitian berikutnya.

Banyuwangi, November 2020

Peneliti

DAFTAR ISI

COVER ……..……. i
PRAKATA ...…...…… ii
KATA PENGANTAR…….……..……. iii
DAFTAR ISI……...……... iv

BAB I FENOMENOLOGI DAN IDEOLOGI…….…… 1
1.1 Teori Fenomenologi…… ……. 1
1.1.1 Sejarah Perkembangan Fenomenologi……..... 1
1.1.2 Fenomenologi sebagai Metode Penelitian……. 2
1.2 Teori Ideologi……..… 4
1.2.1 Pengertian Teori Ideologi…… 4
1.2.2 Ideologi Kapitalis…… 6
1.2.3 Ideologi Sosialisme……. 11
1.2.4 Ideologi Pancasila…….. 14

BAB II KERUKUNAN DALAM BERBANGSA……. 16
2.1 Kerukunan dalam Bangsa……..… 16
2.2 Kerukunan dalam berbudaya…….……..……..……. 16
2.3 Kerukunan dalam Beragama……... 18
2.4 Makna dan Pentingnya Kerukunan Persatuan dan Kesatuan Bangsa …… 19
2.5 Prinsip-Prinsip Persatuan dan Kesatuan Bangsa…….. 20

BAB III TOLERANSI DALAM BERMASYARAKAT PLURAL …… 24
3.1 Toleransi dalam Pluralisme……. …..…… 24
3.2 Masyarakat Plural…….…….. 25
3.3 Agama dalam Masyarakat Multikultural……..……... 26
3.4 Toleransi Beragama dalam Masyarakat Multikultural…… 27
3.5 Tripologi dalam Beragama…… 29
3.5.1 Eksklusivisme…… 29
3.5.2 Inksklusivisme…….. 31
3.5.3 Pluralisme atau Paralelisme…… 32

BAB IV DESA DAN PARIWISATA ……... 34
4.1 Desa dan Pariwisata…… 34
4.2 Potensi Wisata dalam Desa… ……..... 35

BAB V DESA WISATA KEBANGSAAN PATOMAN 38
5.1 Desa Patoman……..…… 38
5.1.1 Sejarah Desa Patoman……..... 38
5.1.2 Letak Geografis Desa Patoman…… 38
5.1.3 Prasarana Ibadah…… 40
5.2 Tolaransi Sebagai Wisata Kebangsaan…..……. 41

5.3 Masyarakat Multikultural di Desa Kebangsaaan Patoman……. 51

BAB VI DESA KEBANGSAAN WATUKEBO…….… 52
6.1 Profil Desa Watukebo……...….... 52
6.1.1 Letak Geografis Desa Watukebo…….…. 53
6.1.2 Sturktur Organisasi dan Tata Kera Pemerintahan di Desa Watukebo…….. 54
6.2 Masyarakat Multikultur di Desa Kebangsaaan Watukebo……. 55
6.2.1 Pola Interaksi dan Hubungan Kemasyarakatan…… 55
6.2.2 Masyarakat Mulkultural di Desa Patoman dan Desa Watukebo……... 55
6.2.3 Penerapan Pancasila Sila Ke 3 …… 57
6.2.4 Memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia … 58
6.2.5 Kegiatan Keagamaan……. 58

DAFTAR PUSTAKA

BAB I
TEORI FENOMENOLOGI DAN IDEOLOGI

1.1 TEORI FENOMENOLOGI

1.1.1 Sejarah Perkembangan Fenomenologi

Secara etimologis, fenomenologi berasal dari kata Yunani, *phainomenon* yang merujuk pada arti "yang menampak". Fenomena adalah fakta yang disadari dan masuk ke dalam pemahaman manusia. Sehingga, suatu objek ada dalam relasi kesadaran.

Dewasa ini, fenomenologi dikenal sebagai aliran filsafat sekaligus metode berpikir yang mempelajari fenomena manusiawi (*human phenomena*) tanpa mempertanyakan penyebab dari fenomena tersebut serta realitas objektif dan penampakannya.

Fenomenologi sebagai salah satu cabang filsafat pertama kali dikembangkan di universitas-universitas Jerman sebelum Perang Dunia I, khususnya oleh Edmund Husserl, yang kemudian dilanjutkan oleh Martin Heidegger dan yang lainnya, seperti Jean Paul Sartre. Selanjutnya, Sartre memasukkan ide-ide dasar fenomenologi dalam pandangan eksistensialisme. Adapun yang menjadi fokus eksistensialisme adalah eksplorasi kehidupan dunia mahluk sadar atau jalan kehidupan subjek-subjek sadar (Engkus Kuswarno, 2009).

Fenomenologin tidak dikenal setidaknya sampai menjelang abad ke-20. Abad ke-18 menjadi awal digunakannya istilah fenomenologi sebagai nama teori tentang penampakan yang menjadi dasar pengetahuan empiris atau penampakan yang diterima secara inderawi. Istilah tersebut diperkenalkan oleh Johann Heinrich Lambert. Sesudah itu, filosof Immanuel Kant mulai sesekali menggunakan istilah fenomenologi dalam tulisannya. Pada tahun 1889, Franz Brentano menggunakan fenomenologi untuk psikologi deskriptif, dimana menjadi awalnya Edmund Husserl mengambil istilah fenomenologi untuk pemikirannya mengenai "kesengajaan".

Sebelum abad ke-18, pemikiran filsafat terbagi menjadi dua aliran yang saling bertentangan. Adalah aliran empiris yang percaya bahwa pengetahuan muncul dari penginderaan. Dengan demikian, kita mengalami dunia dan melihat apa yang sedang terjadi. Bagi penganut empiris, sumber pengetahuan yang memadai itu adalah pengalaman. Akal yang dimiliki manusia bertugas untuk mengatur dan mengolah bahan-bahan yang diterima oleh panca indera.

Sedangkan, di sisi lain terdapat aliran rasionalisme yang percaya bahwa pengetahuan timbul dari kekuatan pikiran manusia atau rasio. Hanya pengetahuan yang diperoleh melalui akallah yang memenuhi syarat untuk diakui sebagai pengetahuan ilmiah. Aliran ini juga mempercayai pengalaman hanya

dapat dipakai untuk mengukuhkan kebenaran yang telah diperoleh oleh rasio. Akal tidak memerlukan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan yang benar sebab akal dapat menurunkan kebenaran tersebut dari dirinya sendiri.

Dari dua pemikiran yang berbeda tersebut, Immanuel Kant muncul untuk menjembatani keduanya. Menurutnya, pengetahuan adalah apa yang tampak kepada kita atau fenomena. Sedangkan fenomena sendiri didefenisikan sebagai sesuatu yang tampak dengan sendirinya dan merupakan hasil sintesis antara penginderaan dan bentuk konsep dari objek. Sejak pemikiran tersebut menyebarluaskan, fenomena menjadi titik awal pembahasan para filsafat pada abad ke-18 dan 19 terutama tentang bagaimana sebuah pengetahuan dibangun.

Fenomenologi bagi Husserl adalah gabungan antara psikologi dan logika. Fenomenologi membangun penjelasan dan analisis psikologi tentang tipe-tipe aktivitas mental subjektif, pengalaman, dan tindakan sadar. Namun, pemikiran Husserl tersebut masih membutuhkan penjelasan yang lebih lanjut khususnya mengenai "model kesengajaan". Pada awalnya, Husserl mencoba untuk mengembangkan filsafat radikal atau aliran filsafat yang menggali akar-akar pengetahuan dan pengalaman. Hal ini didorong oleh ketidakpercayaan terhadap aliran positivistik yang dinilai gagal memanfaatkan peluang membuat hidup lebih bermakna karena tidak mampu mempertimbangkan masalah nilai dan makna. Fenomenologi berangkat dari pola pikir subjektivisme yang tidak hanya memandang dari suatu objek yang tampak namun berusaha menggali makna di Balik setiap gejala tersebut.

Pada tahun-tahun berikutnya, pembahasan fenomenologi berkembang tidak hanya pada tataran "kesengajaan", namun juga meluas kepada kesadaran sementara, intersubjektivitas, kesengajaan praktis, dan konteks sosial dari tindakan manusia. Tulisan-tulisan Husserl memainkan peran yang amat besar dalam hal ini.

Saat ini fenomenologi dikenal sebagai suatu disiplin ilmu yang kompleks, karena memiliki metode dan dasar filsafat yang komrehensif dan mandiri. Fenomenologi juga dikenal sebagai pelopor pemisah antara ilmu sosial dari ilmu alam, yang mempelajari struktur tipe-tipe kesadaran yang dinamakan dengan "kesengajaan" oleh Husserl. Struktur kesadaran dalam pengalaman pada akhirnya membuat makna dan menentukan isi dari penampakannya.

1.1.2 Fenomenologi sebagai Metode Penelitian

Memahami fenomena sebagaimana adanya merupakan usaha kemBali kepada sebagaimana penampilannya dalam kesadaran. Usaha kemBali pada fenomena tersebut memerlukan pedoman metodik. Tidak mungkin untuk melukiskan fenomena-fenomena sampai pada hal-hal yang khusus satu demi

satu. Yang pokok adalah menangkap hakekat fenomena-fenomena. Oleh karena itu metode tersebut harus dapat menyisihkan hal-hal yang tidak hakiki, agar hakekat ini dapat menungkap diri sendiri. Bukan suatu abstraksi melainkan intuisi mengenai hakekat sesuatu (Husserl dalam Basuki, 2006).

Sebagai metode penelitian, fenomenologi sering dikenal sebagai metode deskriptif kualitatif dengan paradigm konstruktivisme (Mix Methodology, 2011). Sesuai dengan asumsi ontologis yang ada dalam paradigm konstruktivisme, peneliti yang menggunakan metode ini akan memperlakukan realitas sebagai konstruksi sosial kebenaran. Realitas juga dipandang sebagai sesuatu yang sifatnya relatif, yaitu sesuai dengan konteks spesifik yang dinilai relevan oleh para actor sosial.

Secara epistemologi, ada interaksi antara peneliti dan subjek yang diteliti. Sementara itu dari sisi aksiologis, peneliti akan memperlakukan nilai, etika, dan pilihan moral sebagai bagian integral dari penelitian. Peneliti merupakan fasilitator yang menjembatani keragaman subyektivitas pelaku sosial dalam rangka merekonstruksi realitas sosial.

Sebagai metode penelitian, fenomenologi adalah cara membangun pemahaman tentang realitas. Pemahaman tersebut dibangun dari sudut pandang para aktor sosial yang mengalami peristiwa dalam kehidupannya. Pemahaman yang dicapai dalam tataran personal merupakan konstruksi personal realitas atau konstruksi subyektivitas.

Asumsi pokok fenomenologi adalah manusia secara aktif menginterpretasikan pengalamannya dengan memberikan makna atas sesuatu yang dialaminya. Oleh karena itu interpretasi merupakan proses aktif yang memberikan makna atas sesuatu yang dialami manusia. Dengan kata lain pemahaman adalah sesuatu tindakan kreatif yakni tindakan menuju pemaknaan (Littlejohn, 2008).

Fenomenologi yang diformulasikan oleh Husserl pada permulaan abad ke-20 menekankan dunia yang menampilkan dirinya sendiri kepada kita sebagai manusia. Tujuannya adalah agar kemBali ke bendanya sendiri sebagaimana mereka tampil kepada kita dan mengesampingkan atau mengurung apa yang telah kita ketahui tentang mereka. Dengan kata lain fenomenologi tertarik pada dunia seperti yang dialami manusia dengan konteks khusus, pada waktu khusus, lebih dari pernyataan abstrak tentang kealamiahan dunia secara umum.

Berikut ini dikemukakan tahapan-tahapan penelitian fenomenologi dari Husserl :

a) Epoche

Berasal dari bahasa Yunani yang berarti “menjauh dari” dan “tidak memberikan suara”. Husserl menggunakan epoche untuk term bebas dari prasangka. Dengan epoche kita menyampingkan penilaian, bias, dan

pertimbangan awal yang kita miliki tehadap suatu objek. Dengan kata lain, epoche adalah pemutusan hubungan dengan pengalaman dan pengetahuan yang kita miliki sebelumnya.

Oleh karena epoche memberikan cara pandang yang sama sekali baru terhadap objek, maka dengan epoche kita dapat menciptakan ide, perasaan, kesadaran, dan pemahaman yang baru. Epoche membuat kita masuk ke dalam dunia internal yang murni sehingga memudahkan untuk pemahaman akan diri dan orang lain. Dengan demikian tantangan terbesar ketika melakukan epoche adalah terbuka atau jujur terhadap diri sendiri.

Segala sesuatu yang berhubungan dengan orang lain, seperti persepsi, pilihan, penilaian, dan perasaan orang lain harus dikesampingkan juga. Hanya persepsi dan tindakan sadar kitalah yang menjadi titik untuk menemukan makna, pengetahuan, dan kebenaran.

b) Reduksi Fenomenologi

Ketika epoche adalah langka awal untuk memurnikan objek dari pengalaman dan prasangka awal, maka tugas dari reduksi fenomenologi adalh menjelaskan dalam susunan bahasa bagaimana objek itu terlihat. Tidak hanya dalam term objek eksternal, namun juga kesadaran dalam tindakan internal, pengalaman, dan ritme. Fokusnya terletak pada kualitas dari pengalaman, sedangkan tantangan ada pada pemenuhan sifat-sifat alamiah dan makna dari pengalaman.

Reduksi akan membawa kita kemBali pada bagaimana kita mengalami sesuatu. Memunculkan kemBali asumsi awal dan mengemBalikan sifat-sifat alamiahnya. Reduksi fenomenologi tidak hanya sebagai cara untuk melihat, namun juga cara untuk mendengar suatu fenomena dengan kesadaran dan hati-hati. Singkatnya reduksi adalah cara untuk melihat dan mendengar fenomena dalam tekstur dan makna aslinya.

c). Variasi Imajinasi

Tugas dari variasi imajinasi adalah mencari makna-makna yang mungkin dengan memanfaatkan imajinasi, kerangka rujukan, pemisahan dan pemBalikan, serta pendekatan terhadap fenomena dari perspekif, posisi, peranan, dan fungsi yang berbeda. Tujuannya tiada lain untuk mencapai deskripsi struktural dari sebuah pengalaman.

Target dari fase ini adalah makna dan bergantung dari intuisi sebagai jalan untuk mengintegrasikan struktur ke dalam esensi fenomena. Dalam berpikir imajinatif, kita dapat menemukan makna-makna potensial yang dapat membuat sesuatu yang asalnya tidak terlihat menjadi terlihat jelas. Membongkar hakikat fenomena dengan memfokuskannya pada kemungkinan-kemungkinan yang murni adalah inti dari variasi imajinasi.

Pada tahap ini, dunia dihilangkan, segala sesuatu menjadi mungkin. Segala pendukung dijauhkan dari fakta dan entitas yang dapat diukur dan diletakkan pada makna dan hakikatnya. Dalam kondisi seperti ini, intuisi tidak lagi empiris namun murni imajinatif.

d) Sintetis Makna dan Esensi

Merupakan tahap terakhir dalam penelitian fenomenologi. Fase ini adalah integrasi intuitif dasar-dasar deskripsi tekstural dan struktural ke dalam satu pernyataan yang menggambarkan hakikat fenomena secara keseluruhan.

Husserl mendefenisikan esensi sebagai sesuatu yang umum dan berlaku universal, kondisi atau kualitas menjadi sesuatu tersebut. Esensi tidak pernah terungkap secara sempurna. Sintesis struktu tekstural yang fundamental akan mewakili esensi ini dalam waktu dan tempat tertentu, dan sudut pandang imajinatif dan studi reflektif seseorang terhadap fenomena.

1.2 TEORI IDEOLOGI

1.2.1 Pengertian Teori Ideologi

Istilah ideologi dipergunakan dalam arti yang bermacam-macam. Istilah ideologi adalah sebuah kata yang terdiri "ideo" dan "logi". Kata "ideo" berasal dari bahasa Yunani eidos, dalam bahasa Latin idea, yang berarti "pengertian", "ide" atau "gagasan". Kata kerja dalam bahasa Yunani *oida* yang berarti mengetahui, melihat dengan budi. Dalam bahasa Jawa kita jumpai kata idep dengan arti tahu, melihat. Kata "logi" berasal dari bahasa Yunani logos, yang berarti "gagasan", "pengertian", "kata", dan "ilmu". Jadi secara etimologis dapat diterangkan bahwa ideologi berarti "pengetahuan tentang ide-ide", *science of ideas* (Gunawan, 1993).

Ideologi adalah sebuah istilah yang lahir pada akhir abad ke-18 atau tahun 1796 yang dikemukakan oleh filsuf Perancis bernama Destutt de Tracy dan kemudian dipakai Napoleon. Istilah itu berasal dari dua kata *ideos* yang berarti gagasan, dan *logos* yang artinya ilmu. Dengan demikian, ideologi adalah sebuah ilmu tentang gagasan. Adapun gagasan yang di maksud adalah gagasan tentang masa depan, sehingga bisa disimpulkan bahwa ideologi adalah sebuah ilmu tentang masa depan. Gagasan ini juga sebagai cita-cita atau kombinasi dari keduanya, yaitu cita-cita masa depan. Sungguh pun cita-cita masa depan itu sebagai sebuah utopia, atau impian, tetapi sekaligus juga merupakan gagasan ilmiah, rasional, yang bertolak dari analisis masa kini. Ideologi ini tidak sekedar gagasan, melainkan gagasan yang diikuti dan dianut sekelompok besar manusia atau bangsa, sehingga karena itu ideologi bersifat mengerakkan manusia untuk merealisasikan gagasan tersebut. Meskipun gagasan seseorang, betapapun ilmiah, rasional atau luhurnya, belum bisa

disebut ideologi, apabila belum dianut oleh banyak orang dan diperjuangkan serta diwujudkan, dengan aksi-aksi yang berkesinambungan (Sarbini, 2005).

Sedangkan ideologi dalam bahasa Arab, merupakan istilah yang dapat diterjemahkan sebagai *Mabda*', secara etimologis *mabda*' adalah mashdar mimi dari kata *bada'a* (memulai), *yabda'u* (sedang memulai), *bad'an* (permulaan), dan *mabda'an* (titik permulaan). Secara terminologis berarti pemikiran mendasar yang dibangun diatas pemikiran-pemikiran (cabang) (Athiat, 2004).

Dari sisi lain, ideologi tersusun dari ide dan metode, Ideologi dari sisi ini ditinjau dari segi: Pertama, konsep atau pemikiran murni yang semata-mata merupakan penjelasan konseptual tanpa disertai bagaimana metode menerapkan konsep itu dalam kenyataan dan Kedua, metodologi yang menjelaskan bagaimana pemikiran atau konsep itu diterapkan secara praktis. Tinjauan ideologi sebagai kesatuan ide dan metode ini dimaksudkan untuk menerangkan bahwa metode adalah suatu keharusan agar ide dapat terwujud. Di samping itu, juga untuk menerangkan bahwa ide dan metode suatu ideologi adalah unik. Artinya, setiap ada ide dalam sebuah ideologi, pasti ada metode yang khas untuk menerapkan ide tersebut, yang berasal dari ideologi itu sendiri, bukan dari ideologi yang lain.

Ide merupakan sekumpulan konsep atau pemikiran yang terdiri dari aqidah dan solusi terhadap masalah manusia. Sedang metode yang merupakan metodologi penerapan ideologi secara operasional-praktis terdiri dari penjelasan cara solusi masalah, cara penyebarluasan ideologi, dan cara pemeliharan aqidah. Jadi, ideologi ditinjau dari sisi ini adalah gabungan dari ide dan metode, sebagai satu kesatuan.

Definisi ideologi yang telah diterangkan di atas bersifat umum, dalam arti dapat dipakai dan berlaku untuk ideologi-ideologi dunia seperti Kapitalisme dan Sosialisme. Dan tentu, dapat berlaku juga untuk Islam. Sebab Islam memang mempunyai sebuah aqidah akliyah, yaitu Aqidah Islamiyah, dan mempunyai peraturan hidup yang sempurna, yaitu Syariat Islam.

Meskipun suatu ideologi telah memiliki solusi masalah kehidupan yang fundamental dan mempunyai cara memecahkan berbagai permasalahan kehidupan manusia, namun itu bukanlah jaminan bahwa ideologi tersebut merupakan ideologi yang benar, yang mempunyai kemampuan untuk membawa manusia mencapai kebahagian hakiki dan menghindarkannya dari malapetaka kehidupan di dunia.

Ideologi yang benar adalah ideologi yang muncul di dalam pemikiran manusia melalui wahyu Allah. Karena ideologi ini bersumber dari Pencipta alam semesta, manusia dan kehidupan, Yang Maha Mengetahui segala sesuatu, sehingga pemecahan atas permasalahan pokok kehidupan dan

berbagai permasalahan kehidupan lainnya kebenarannya pasti. Sedangkan ideologi yang muncul di dalam pemikiran manusia karena kegeniusannya adalah ideologi yang salah, karena manusia hanyalah makhluk Allah sehingga memiliki kelemahan termasuk ketidakmampuan akalnya dalam menangkap seluruh realitas yang ada di dunia ini. Manusia juga selalu memiliki pandangan yang berbeda terhadap suatu masalah seperti masalah hukum dan kebijakan publik sehingga muncul pertentangan dan perselisihan yang menyebabkan pandangan mayoritas atau mungkin hanya pandangan orang-orang yang memiliki kekuatan (kekuasan atau harta) di atas orang lainnya yang akan diterapkan atau dipaksakan. Akibatnya pandangan yang diterapkan sangat kontradiksi dengan kebenaran yang seharusnya dan mengakibatkan kesengsaraan manusia.

Ideologi mempunyai fungsi penting, yaitu menanamkan keyakinan atau kebenaran perjuangan kelompok atau kesatuan yang berpegang teguh pada ideologi itu. Maka ideologi menjadi sumber inspirasi dan sumber cita-cita hidup bagi para warganya, khususnya para warganya yang masih muda. Ideologi berupa pedoman artinya menjadi pola dan norma hidup. Tetapi sekaligus menjadi ideal atau cita-cita. Realisasi dari ide-ide dipandang sebagai kebesaran, kemuliaan manusia. Dengan melaksanakan ideologi, manusia tidak hanya sekedar ingin melakukan apa yang disadari sebagai kewajiban. Dengan ideologi manusia mengejar keluhuran. Oleh karena itu, manusia sanggup mengorbankan harta benda, bahkan hidupnya demi ideologi, karena ideologi menjadi pola, norma hidup dan dikejar pelaksanaannya sebagai cita-cita, maka tidak mengherankan lagi jika ideologi menjadi bentuk hidup.

1.2.1. Ideologi Kapitalis

Ideologi Kapitalis merupakan ideologi yang muncul dan berkembang pertama kalinya di Eropa. Asas ideologi Kapitalis adalah Sekularisme (pemisahan agama dari kehidupan dunia). Disebut ideologi Kapitalis karena sistem ekonomi Kapitalis dengan “kebebasan dalam kepemilikan” merupakan aspek yang paling menonjol dari ideologi ini.

Akidah ini merupakan hasil pergolakan pemikiran di Eropa dan Rusia antara para filosof dan pemikir yang berusaha melawan negara dan gereja yang pada saat itu sangat menindas rakyatnya sendiri. Para raja dan kaisar memanfaatkan otoritas gereja untuk kepentingannya, seBaliknya gereja memanfaatkan raja untuk mengukuhkan dogma-dogmanya. Mereka mengeksploitasi, menghisap, dan menzalimi rakyat untuk kepentingan dan keuntungan para raja dan pemegang otoritas gereja.

Doktrin yang eksis pada saat itu menganggap raja sebagai wakil Tuhan, sehingga setiap individu yang beriman kepada Tuhan dituntut tunduk

dan patuh pada raja karena itulah kewajiban yang harus dilaksanakan rakyat. Tetapi dalam doktrin ini raja tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki kewajiban terhadap rakyatnya sendiri. Dari penindasan tersebut muncul pemikiran bahwa jika mereka beriman kepada Tuhan maka sama saja mereka menerima penindasan, sehingga jika mereka ingin lepas dari penindasan dan mendapatkan kebebasan mereka harus meninggalkan Tuhan.

Pada abad ke-15 dan 16 muncul kebangkitan besar-besaran melawan otoritas gereja dan kezaliman negara. Sebagian para filosof dan pemikir yang menentang raja-raja zalim mengingkari agama, sebagian lagi mengambil jalan tengah dengan pandangan agama harus dipisahkan dari kehidupan dunia (Sekularisme). Akhirnya, pada abad ke-17 para filosof dan pemikir terbebaskan dari pasungan otoritas gereja karena di antara kedua pihak yang bertikai melakukan kompromi dengan mengambil jalan tengah yaitu Sekularisme (pemisahan agama dari kehidupan dunia). Berakhirnya pergolakan pemikiran ini menjadi tanda keruntuhan otoritas gereja dan kebangkitan ilmu pengetahuan Barat yang sekuler.

Sekularisme (pemisahan agama dari kehidupan dunia) sebagai asas, Kapitalisme mengakui keberadaan Tuhan secara tidak langsung. Sekularisme ini berpandangan bahwa alam semesta, manusia, dan kehidupan berasal dari Tuhan dan akan kemBali kepada Tuhan. Hanya saja dalam kehidupan di dunia, akidah ini tidak mengakui Tuhan. Mereka berpandangan kehidupan manusia atau urusan publik merupakan wewenang manusia itu sendiri, karena Sekularisme menjadikan manusia sebagai sumber dan pembuat hukum, sedangkan peranan agama hanya berada dalam wilayah pribadi atau personal masing-masing individu (menjadi urusan individu).

Para pengemban Sekularisme tersebut menempatkan rasio manusia dan empirisme di atas segala-galanya. Mereka berpendapat rasionalisme dan emperisme dapat memecahkan segala permasalahan yang ada di dunia ini secara komprehensif dan tuntas, sehingga manusia sendirilah yang memiliki solusi permasalahan hidupnya dan membuat peraturan-peraturan solusinya.

Dengan demikian pemikiran sekuler itulah yang menjadi solusi fundamental kapitalisme dalam problematika pokok kehidupan. Pemikiran sekurel yang mendorong dan sebagai dasar lahirnya pemikiran-pemikiran ideologi Kapitalis. Berdasarkan proses kelahiran dan pandangan akidah Sekularisme, maka ideologi Kapitalis adalah ideologi yang salah (*bathil*). Pemisahan agama dari kehidupan jelas merupakan pemasungan terhadap agama. Pandangan ini membatasi peran Tuhan hanya pada kepentingan individu yakni sebatas yang mereka anggap kepuasan ruhiah (agama sebagai tempat pelarian), itu pun setiap individu diberikan kebebasan untuk menyembah Tuhan atau tidak bertuhan (atheis). Permasalahannya, ketika

tuntunan agama mewajibkan manusia menerapkan peraturan-peraturan Tuhan tidak hanya dalam masalah ibadah ritual saja tetapi juga dalam kehidupan publik, maka landasan berfikir Sekularisme menolak tuntunan agama ini. Maksudnya, Sekularisme menolak peran Tuhan dalam kehidupan publik. Jadi, meskipun Sekularisme tidak mengingkari Tuhan sebagai Pencipta tetapi Sekularisme mengingkari tujuan Tuhan menciptakan alam semesta, manusia, dan kehidupan. Pandangan ini jelas merupakan suatu pengingkaran terhadap Tuhan.

Dengan demikian landasan berfikir Sekularisme secara tegas dan pasti menolak bahkan menghancurkan setiap ajaran agama yang menyuruh manusia menerapkan hukum-hukum Tuhan yang mengatur masalah publik. Penolakan Sekularisme ini jelas sebagai pembunuhan terhadap fitrah manusia, yakni naluri beragama, sebab Sekularisme menolak dan menghancurkan setiap manusia yang menyalurkan naluri beragamanya secara sempurna. Setiap prinsip atau ajaran atau pemikiran yang mengekang dan membunuh fitrah manusia adalah salah. Jadi atas dasar ini Sekularisme merupakan akidah yang salah.

Meskipun akidah Sekularisme merupakan akidah akliyah, karena ia memecahkan permasalahan fundamental kehidupan dengan jalan pemikiran, akan tetapi akidah ini tidak dibangun dari pemikiran yang benar. Sekularisme hanyalah akidah yang lahir atas dasar kompromi bukan atas dasar suatu pemikiran yang utuh dan tidak pula teruji kesahihannya. Kompromi dilakukan oleh dua pihak yang memiliki pemikiran yang saling bertentangan, antara pihak yang menginginkan tetap bergabungnya otoritas gereja dengan negara dalam mengontrol kehidupan negara dan masyarakat dengan pihak yang menolak sama sekali keberadaan agama di muka bumi. Jelas berdasarkan latar belakang dilakukannya kompromi tersebut, maka Sekularisme bukanlah akidah yang dibangun berdasarkan akal jernih tetapi atas dasar jalan tengah (pencampur-adukan), sehingga akidah ini sebenarnya tidak dapat memuaskan akal.

Suatu akidah yang dibangun berdasarkan kesalahan, maka ide (*fikrah*) dan metode (*thariqah*) yang dilahirkannya juga salah sehingga ideologi yang dibangun dari akidah ini tidak dapat membawa manusia kepada kebahagiaan hakiki selain malapetaka kehidupan di dunia, seperti halnya suatu bangunan yang dibangun dari fondasi yang rapuh maka bangunan tersebut juga sangat rapuh sehingga membahayakan para penghuninya.

Bagi para pengemban ideologi Kapitalis, Sekularisme merupakan jalan menuju kebangkitan, karena dengan memisahkan agama dari kehidupan, praktis tidak ada lagi hambatan dalam pengembangan pemikiran dan ilmu pengetahuan. Mereka benar-benar memperoleh kemandirian dari pengaruh

ajaran Kristen yang selalu menghambat ilmu pengetahuan, serta mendapatkan kebebasan untuk berpikir dan merealisasikan ide-idenya. Perkembangan pemikiran dan ilmu pengetahuan inilah pada abad ke-18 telah menjadi ruh revolusi Perancis dan revolusi Industri.

Asas kapitalisme menetapkan bahwa Pencipta tidak memiliki kaitan apapun dengan apa yang diciptakan-Nya–apakah itu berupa alam semesta dan manusia ataupun kehidupan. Oleh karena itu, yang memiliki hak dalam menetapkan sistem dan aturan hidup adalah manusia itu sendiri. Karenanya, menurut kapitalisme manusia melalui akalnya yang sanggup untuk mengaitkan dan menciptakan sesuatu menjadi satu-satunya makhluk yang memiliki kemampuan untuk menetapkan sistem yang akan mengatur kehidupannya.

Inti pemikiran yang terkandung di dalam Sekularisme adalah kebebasan individu. Kebebasan individu merupakan prinsip yang harus diwujudkan dalam ideologi Kapitalisme, sebab prinsip kebebasan individu menjamin keberlangsungan Sekularisme terutama dalam hal pelaksanaan kedaulatan dan menjalankan kehendak rakyat secara sempurna.

Dari titik tolak ini lahirlah ide tentang empat kebebasan, yaitu :

1) Kebebasan beragama (*freedom of religion*)
2) Kebebasan berpendapat (*freedom of speech*)
3) Kebebasan kepemilikan (*freedom of ownership*)
4) Kebebasan berperilaku (*freedom of behavior*)

Untuk memelihara dan menjamin keberlangsungan Sekularisme, Kapitalisme membuat peraturan-peraturan yang menjamin kebebasan beragama. Peraturan-peraturan tersebut memberikan kebebasan kepada manusia untuk beragama atau tidak beragama dan melarang individu memaksakan agamanya kepada individu lainnya. Akan tetapi, jaminan kebebasan ini hanya sampai pada satu titik, yaitu tidak ada jaminan bagi individu yang melaksanakan agamanya secara sempurna yang mana agamanya memiliki peraturan negara, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan. Kepemimpinan ideologi Kapitalisme akan menghalang-halangi dan menghancurkannya dengan menciptakan propaganda dan perangkat hukumnya.

Dalam sistem politik, Kapitalisme menerapkan sistem demokrasi. Sistem demokrasi yang diterapkan merupakan suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Aspek paling fundamental dalam demokrasi adalah kedaulatan di tangan rakyat dan rakyat sebagai sumber kekuasaan. Aspek ini merupakan implementasi sekaligus sebagai jalan Kapitalisme dalam menjamin keberadaan Sekularisme (pemisahan agama dari kehidupan).

Dengan kedaulatan di tangan rakyat, maka sistem demokrasi menempatkan rakyat sebagai sumber dan pembuat hukum bukan Tuhan. Agar aspek ini jalan, demokrasi menciptakan badan legislatif sebagai lembaga yang membuat undang-undang. Lembaga ini merupakan lembaga perwakilan rakyat dalam membuat undang-undang sekaligus untuk mewakili aspirasi rakyat. Sedangkan untuk menerapkan dan menjaga undang-undang yang dibuat legislatif, rakyat memberikan kekuasaannya kepada pemerintah (eksekutif) untuk melaksanakannya.

Dalam memilih wakil rakyat dan menentukan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan, sistem demokrasi menggunakan cara pemilihan umum dan referendum. Dari mekanisme demokrasi inilah lahir berbagai undang-undang dan kebijakan pemerintah dalam mengatur kehidupan negara dan masyarakat, sehingga sistem ini sangat menentukan bagaimana sistem hukum dibuat dan diterapkan serta untuk kepentingan apa hukum tersebut diadakan. Karena itu penguasaan atas lembaga eksekutif dan legislatif menjadi rebutan partai politik, sehingga dari sini orientasi politik dalam demokrasi adalah kekuasaan bukan memberikan pelayanan dan perlindungan bagi rakyat.

Agar mekanisme demokrasi tersebut dapat berjalan, maka sistem ini memberikan jaminan kebebasan berpendapat kepada setiap orang baik pendapat tersebut membawa kemaslahatan bagi rakyat atau golongannya saja maupun pendapat yang hakikatnya merusak kehidupan masyarakat. Setiap orang diberikan hak untuk mengemukakan pendapatnya, mendirikan partai politik, memilih atau tidak memilih dan untuk dipilih sebagai wakil rakyat atau sebagai penguasa.

Meskipun memberikan jaminan kebebasan bependapat atau berpolitik, tetapi Kapitalisme menolak dan mengancam pihak yang pendapat dan sikap politiknya bertentangan dengan ideologi ini. Jaminan kebebasan berpendapat atau berpolitik akan terancam jika pihak tersebut bertentangan dengan Sekularisme. Ideologi Kapitalisme akan menciptakan propaganda dan peperangan untuk menghancurkan gerakan, partai, dan negara yang tidak mengindahkan nilai-nilai Sekularisme dan Kapitalisme.

Walaupun demokrasi terlahir dari asas ideologi ini dan menjadi bagian mendasar dari sistemnya, bahkan menjadi model utama sistem ideologi ini. Akan tetapi, demokrasi bukan sesuatu yang paling menonjol, bahkan tidak lebih menonjol dari sistem ekonomi ideologi kapitalisme. Pengaruh sistem ekonomi atas sistem pemerintahan di Barat sangat kuat. Hal itu bisa diamati dalam pemilihan presiden Amerika Serikat. Pengaruh para pemilik modal sangat kuat pengaruhnya terhadap hasil akhir pemilihan kepala negara dan

anggota kongres. Seolah-olah para pemilik modal itulah yang menjadi penguasa sebenarnya di negara tersebut.

Dalam sistem ekonomi, Kapitalisme menempatkan kebebasan kepemilikan sebagai motor penggerak perekonomiannya. Kebebasan kepemilikan merupakan kebebasan setiap individu untuk memiliki harta dalam bentuk apapun dan mengembangkannya dengan sarana dan cara yang diinginkannya. Oleh Karen itu, bukanlah suatu persoalan pemenuhan kepemilikan yang diinginkan orang tersebut apakah berasal dari perut (dari kebutuhannya) atau cuma dari fantasinya (khayalan) saja. Juga bukan persoalan apakah kepemilikan yang dikuasainya memiliki sifat menguasai hajat hidup orang banyak atau memiliki sifat merusak. Setiap orang bebas bersaing untuk mendapatkan kekayaan dan keuntungan materi (profit).

Sinergisme antara kebebasan kepemilikan dan filsafat ekonomi sekuler dengan revolusi Industri semakin mengukuhkan penguasaan kekayaan di tangan segelintir orang yang memiliki modal kuat saja. Mekanisme ekonomi seperti ini menyebabkan akumulasi modal (kapital) secara terus-menerus ke tangan para pemilik modal. Dari sinilah muncul istilah kapitalis.

Ringkasnya, kapitalisme bisa disebut sebuah ideologi. Alasannya karena Kapitalisme memiliki ide dan metode. Idenya adalah asas dan sistem aturan yang memberikan solusi atas berbagai permasalahan manusia. Sedangkan, metode Kapitalisme terlihat dari keberadaan tata cara untuk melaksanakan ideologi tersebut. Dan itu dilakukan dengan cara menerapkan aturan tersebut pada bangsa yang menganutnya. Indikasi paling tepat atas hal itu adalah bisa diterapkannya sistem ini, dimana kapitalisme telah menguasai sebagian besar belahan dunia, seperti Amerika dan Eropa Barat. Hal itu terjadi melalui tegaknya negara.

Kapitalisme juga memiliki metode atau tata cara untuk menyebarkan ideologi sekaligus mengembannya kepada bangsa-bangsa lain. Metode tersebut dilakukan melalui (praktek) penjajahan. Hal ini juga telah dipraktekkan secara nyata, dimana negara-negara tersebut telah menjajah sebagaian besar negara-negara lain di dunia dalam kurun waktu yang cukup panjang. Hal itu telah menimpa wilayah kita dan wilayah-wilayah lain di dunia. Negara-negara kapitalis itu akan tetap berusaha melanggengkan penjajahan dalam rangka menyebarkan ideologi kapitalisnya kepada bangsa-bangsa lain dengan berbagai macam cara.

Kapitalisme juga mempunyai metode untuk memelihara dan mencegah kemusnahan ideologinya. Itu dilakukan dengan cara menempatkan ideologi ini bisa merealisasikan kepentingan dan kemaslahatan manusia, tidak bertentangan dengan kemaslahatan, kepentingan dan keinginan manusia,

bagaimanapun bentuknya. Inilah yang mendorong manusia untuk tetap menjaga kelestariannya dan mencegah kepunahannya.

1.2.2 Ideologi Sosialisme

Sebagai sebuah faham atau ideologi, kata Sosialisme muncul di Perancis sekitar tahun 1830. Secara bahasa, Sosialisme berasal dari bahasa Latin yakni "*socius*" yang berarti teman, sahabat, atau saudara. Sedang "*isme"* yang di belakangnya berarti faham atau ajaran. Dari sisi *etimologis* ini, bisa pahami pengertian sederhana sosialisme adalah paham yang mementingkan masyarakat daripada individu. Secara umum, pengertian sosialisme digunakan untuk mengacu pada sebuah ideologi. Paham yang bertujuan perubahan bentuk masyarakat dengan menjadikan perangkat produksi menjadi miliki bersama dan pembagian hasil secara merata. Di samping pembagian lahan kerja dan bahan konsumsi secara menyeluruh. Dapat pula, didefinisikan Sosialisme adalah sistem hidup yang menjamin hak asasi manusia, hak sama rata (*equality*), demokrasi, kebebasan, dan sekularisme. Jaminan ini akan mewujudkan keadilan secara keseluruhan.

Term "sosialis" pertama kali dipakai pada tahun 1827 dalam *cooperative magazine* sebagai gambaran umum doktrin kooperatif Robert Owen, dan kemudian sebagai "sosialisme" pada tahun 1832 dalam *la globe*, jurnal milik pengikut tokoh sosialis Claude Henri de Rouvroy dan Comte de Saint Simon (1760-1825). Pada masa ini istilah sosialisme digunakan untuk pembedaan dengan individualisme, terutama oleh pengikut-pengikut Saint Simon, bapak pendiri sosialisme Prancis. Saint Simon merupakan salah satu tokoh yang menganjurkan pembaruan pemerintahan yang bermaksud mengemBalikan harmoni pada masyarakat.

Dalam perkembangan dan cita-cita sosialisme berikutnya, perjuangan sosialisme mencapai puncak prosesnya pada Karl Marx, yang popular dengan istilah *Marxisme*. Pada akhir abad ke-19, Karl Marx dan Friedrich Engels mencetuskan apa yang disebut sebagai sosialisme ilmiah. Marx dan Engels menyebut sosialisme tersebut dengan sosialisme utopia, artinya sosialisme yang hanya didasari impian belaka tanpa kerangka rasional untuk menjalankan dan mencapai apa yang disebut sosialisme. Oleh karena itu, Marx dan Engels mengembangkan beberapa tesis untuk membedakan antara sosialisme dan komunisme. Menurut mereka, sosialisme adalah tahap yang harus dilalui masyarakat untuk mencapai komunisme. Dengan demikian, komunisme atau masyarakat tanpa kelas adalah tujuan akhir sejarah. Konsekuensinya, tahap sosialisme adalah tahap kediktatoran rakyat untuk mencapai komunisme, seperti halnya pendapat Lenin yang mengatakan bahwa Uni Sovyet berada dalam tahap sosialisme.

Sosialisme memandang bahwa kehidupan ini sebagai materi yang terdiri atas manusia, alam semesta, dan kehidupan. Materi adalah asal dari segala sesuatu dan evolusi materi akan mewujudkan segala sesuatu. Ini berarti mereka menolak adanya Pencipta sesuatu yang ada dan mengingkari aspek ruhani pada segala sesuatu itu. Mengakui adanya aspek ruhani menurut sosialisme berbahaya bagi manusia, mereka menyadari agama adalah candu bagi masyarakat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Marx yang mana suatu kenyataan social dan sejarah yang mneyertakan suatu analisis tentang agaman sebagai salah satu berbagai bentuk ideologi. Dimana Marx memandang agama sebagai produkkerohanian suatu masyarakat, hasil dari gagasan-gagasan, perlambangan-perlambangan dan alam kesadaran yang semuanya jelas dibentuk oleh produksi material dan berkaitan erat dengan hubungan social yang ada dalam masyarakat. Pemikiran inilah yang dijadikan atas dasar lahirnya asas sosialisme ditegakkan.

Dengan demikian, materi adalah dasar pemikiran bagi mereka karena proses berpikir menurut mereka adalah refleksi materi (benda) pada otak, tidak lebih dari itu. Evolusi materi dianggap merupakan penyebab dari segala sesuatu yang ada. Mereka mengingkari adanya Pencipta dan Hari Kiamat. Materi itu *azali* (tak berawal dan tak berakhir) sehingga kehidupan ini hanya untuk kehidupan itu saja. Di atas pemikiran tersebut, seperti inilah dibangun seluruh pemikiran cabang dan aturan kehidupan mereka.

Sosialisme hanya berdiri tegak di atas asas pemikiran "Tidak ada Tuhan dan kehidupan hanya berupa materi belaka". Artinya, tidak ada Zat yang telah menciptakan alam semesta dan segala sesuatu yang ada di dalamnya hanya berupa materi yang berkembang (berevolusi) karena kemauannya sendiri. Dari sini lahirlah berbagai bentuk materi yang menjadi bagian dari alam semesta ini. Materi yang paling tinggi dari yang ada adalah manusia. Dan sesuatu yang paling tinggi pada manusia adalah otaknya, yang merupakan hasil evolusi dari materi. Jadi, menurut sosialisme, tidak ada sesuatu yang lain di luar bingkai alam semesta, manusia, dan kehidupan. Pemikiran (ide) tentang adanya sang Pencipta hanyalah sebuah kebohongan belaka dan hal itu adalah penyesatan yang dilakukan oleh orang kaya untuk menghisap darah orang miskin (*proletar*).

Agama adalah candu bagi pemeluk agama manusia (bangsa), dan agama merupakan kesadaran palsu tentang alam, karena sebenarnya manusialah yang membangun agama dan bukan seBaliknya. Begitu pula kelemahan dan kebodohan menjadi dua sumber bagi akhlak dan agama. Oleh karena itu agama tidak akan diikuti, kecuali hanya oleh mereka yang lemah akalnya. Argumentasi ini tidak sesuai dengan fitrah manusia, sebab kecenderungan beragama dalam diri manusia menjadi sesuatu yang pasti adanya dan ketiadaan pengakuan akan keberadaan naluri beragama sama seperti tidak mengakui bahwa manusia yang haus amat membutuhkan air.

Sosialisme tidak sesuai dengan fitrah manusia. Sebab meskipun sosialisme mengingkari adanya Allah dan ruh, akan tetapi ia tetap tidak mampu memusnahkan naluri beragama (sebagai fitrah manusia). Sosialisme hanya mampu mengalihkan pandangan manusia kepada sesuatu kekuatan yang lebih besar dibanding dirinya dan mengalihkan perasaan *taqdis* (mensucikan) kepada kekuatan besar tersebut.

Menurut sosialisme, kekuatan itu berada di dalam ideologi dan diri para penganutnya. Ini berarti, mereka telah mengemBalikan manusia ke masa silam yaitu masa animisme (mengalihkan penyembahan kepada Allah ke penyembahan makhluk-makhluk-Nya; dari pengagungan terhadap ayat-ayat Allah kepada pengkultusan terhadap doktrin- doktrin yang diucapkan makhluk-makhluk-Nya). Semua ini menyebabkan kemunduran manusia ke masa silam. Mereka tidak mampu memusnahkan fitrah beragama, melainkan hanya mengalihkan fitrah manusia.

Sosialisme tidak dibangun di atas akal, tetapi bersandar pada materialism. Sekalipun dihasilkan oleh akal, karena ide sosialisme menyatakan bahwa materi itu ada sebelum adanya pemikiran (pengetahuan). Jadi tatkala otak memantulkan materi akan menghasilkan pemikiran, kemudian otak akan memikirkan hakikat materi yang dipantulkan ke otak. Sebelum itu terjadi tentu tidak akan muncul pemikiran. Dengan demikian, segala sesuatu menurut sosialisme haruslah berlandaskan pada materi. Karena ini menjadikan segala sesuatu berasal dari materi. Dengan demikian, ide ini bersifat materialistis.

Menurut Sosialisme tidak mungkin ada sesuatu yang disebut dengan kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, kebebasan kepemilikan, dan kebebasan berperilaku. Akidah dan pendapat itu menjadi sesuatu yang dibatasi atau ditentukan oleh apa yang diinginkan negara. Begitupula ekonomi, menjadi sesuatu yang ditentukan oleh keinginan negara. Karena itu, negara menjadi sesuatu yang disucikan oleh ideologi ini. Dari filsafat materialisme ini lahir seluruh aturan-aturan (sistem) kehidupan dan sistem ekonominya menjadi asas pertama bagi seluruh sistem yang lain.

1.2.3 Ideologi Pancasila

Sala satu sebab kokoh berdirinya sebuah komunitas masyarakat adalah adanya ideologi yang dibangun bersama demi kemaslahatan bersama. Ideologi berfungsi sebagai doktrin terhadap masyarakat tersebut yang menyebabkan adanya kesadaran untuk mewujudkan kemaslahatan bersama tanpa membedakan satu dengan yang lain. Hal ini tak terkecuali dengan Bangsa Indonesia. Sejak pertama kali negara ini berdiri, para perumus Pancasila berkeinginan menjadikan Pancasila sebagai dasar ideologi dalam berbangsa dan bernegara. Sehingga,

substansi dari nilai-nilai yang terdapat dalam lima pasal benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh semua masyarakat Indonesia.

Secara etimologi, ideologi berasal dari kata *'idea'* yang berarti *gagasan, konsep, pengertian dasar dan cita cita,* dan *'logos'* yang berarti *'ilmu'*. Kata *'idea'* berasal dari kata bahasa Yunani *'eidos'* yang artinya *'bentuk'*. Di samping itu ada kata *'idein'* yang artinya *'melihat'*. Maka secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide ide *(the science of ideas)* atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Secara terminologi, ideologi dapat diartikan sebagai kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut dan mengatur tingkah laku sekelompok manusia tertentu dalam berbagai bidang kehidupan. Jika diposisikan sebagai sistem pemikiran *(Syistem of Thought)* maka ideologi terbagi menjadi dua. Ideologi yang bersifat terbuka dan tertutup.

Dalam potretnya sebagai sebuah ideologi, Pancasila merupakan ideologi yang terbuka, yang tidak kaku, dan tertutup. Ini dimaksudkan bahwa Pancasila mempunyai sifat yang aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan perkembangan zaman. Sebagai suatu ideologi yang bersifat terbuka, Pancasila mempunyai beberapa dimensi. Diantaranya *dimensi idealistis,* yakni nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersiat sistematis dan rasional yaitu hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila Pancasila yaitu, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Yang kedua, adalah *dimensi normatif,* yang artinya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma, sebagaimana terkandung dalam pembukaan UUD 1945 yang memiliki kedudukan tertinggi dalam dalam tertib hukum Indonesia. Ketiga, adalah *dimensi realistis* yang artinya, sebagai suatu sistem ideologi Pancasila harus mampu mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Berdasarkan hakikat ideologi Pancasila yang bersifat terbuka yang memiliki tiga dimensi tersebut maka ideologi Pancasila tidak bersifat *'utopis'* yang hanya merupakan sistem ide-ide belaka yang jauh dari kenyataan hidup sehari-hari. Keterbukaan ideologi Pancasila ini bisa disaksikan bahwa Pancasila bisa menerima budaya asing yang masuk ke Indonesia. Ini bukan berarti bahwa keterbukaan ini adalah terbuka tanpa batas. Melainkan, harus ada standar nilai dan tolak ukur bahwa terhadap budaya asing tersebut bahwa tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan serta keadilan.

Bagi bangsa dan negara Indonesia, dasar filsafat dalam kehidupan bersama itu adalah Pancasila. Pancasila sebagai *core philosophy* negara Indonesia, sehingga konsekuensinya merupakan esensi *staatsfundamentalnorm* bagi reformasi konstitusionalisme. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam filsafat

negara tersebut sebagai dasar filosofis ideologis untuk mewujudkan cita-cita negara, baik dalam arti tujuan prinsip konstitusionalisme sebagai suatu negara hukum formal, maupun empat cita-cita kenegaraan yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945, yaitu: (1) Melindungi segenap bangsa dan tumpa darah Indonesia, (2) Memajukan *(meningkatkan)* kesejahteraan umum, (3) Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Bilamana kita rinci secara sistematis kedudukan Pancasila sebagai dasar kerohanian negara dapat disusun secara bertingkat seluruh kehidupan negara sebagai penjelmaan Pancasila. Unsur-unsur ini terkandung dalam pembukaan UUD 1945 alenia ke IV. Susunan tersebut menunjukkan, bahwa Pancasila pada hakikatnya merupakan dasar atau basis filosofi bagi negara dan tertib hukum Indonesia. Hal ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Pancasila merupakan dasar filsafat negara *(asas kerohanian negara),* pandangan hidup dan filsafat hidup.
2. Di atas basis *(dasar)* itu berdirilah negara Indonesia, dengan asas politik negara *(kenegaraan)* yaitu berupa republik yang berupa kedaulatan rakyat.
3. Kedua-duanya menjadi basis penyelengaraan kemerdekaan kebangsaan Indonesia, yaitu pelaksanaan dan penyelengaraan negara sebagaimana tercantum dalam hukum positif Indonesia, termuat dalam Undang-undang Dasar Negara Indonesia.
4. Selanjutnya di atas, Undang-undang dasar *(yaitu sebagai basis)* maka berdirilah bentuk susunan pemerintahan dan keseluruhan peraturan hukum positif yang lainnya, yang mencakup segenap bangsa Indonesia dalam suatu kesatuan hidup bersama yang berasas kekeluargaan.
5. Segala sesuatu yang disebutkan di atas adalah demi tercapainya tujuan bersama, yaitu tujuan bangsa Indonesia dalam bernegara tersebut, yaitu kebahagiaan bersama, baik jasmaniah maupun rohaniah, serta tuhaniah.

BAB II
KERUKUNAN DALAM BERBANGSA

2 . 1 Kerukunan dalam Bangsa

Manusia dengan akal budi serta pikirannya telah sejak lama berusaha menggali kesadaran mereka dan memahami tujuan dari penciptaan dirinya. Sebagai makhluk sosial setiap manusia akan saling membutuhkan satu sama lain. Manusia tidak akan bisa bertahan hidup di bumi ini jika mereka hidup secara individual. Namun demikian, interaksi antar individu manusia dalam sebuah masyarakat tidak jarang justru menimbulkan pertikaian atau konflik karena setiap individu manusia memiliki karakter, latar belakang, kepentingan, dan kebutuhan yang berbeda-beda.

Seringkali pertikaian atau konflik yang terjadi dalam beragam bentuk, skala, dan tingkatan mendatangkan duka cita dan kepedihan yang mendalam di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, perlu upaya-upaya untuk mencegah dan mengendalikan pertikaian atau konflik tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan sikap toleransi dan tenggang rasa di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Adian Husaini (2015) mendefinisikan toleransi sebagai kemampuan dan kerelaan untuk menerima segala bentuk perbedaan identitas pihak lain secara penuh. Sedangkan, sikap intoleran dapat dimaknai sebagai kegagalan dalam menerima perbedaan identitas secara utuh tersebut. Jika setiap anggota masyarakat memiliki sikap toleransi yang tinggi maka diharapkan akan terwujud kerukunan dalam masyarakat tersebut. Bukan hanya kerukunan yang diperoleh melalui toleransi, ekonomi masyarakat juga akan berjalan dengan baik dan lancer.

Kerukunan dalam kehidupan dapat mencakup 4 hal, yaitu: kerukunan dalam rumah tangga; kerukunan dalam beragama; kerukunan dalam masyarakat; dan kerukunan dalam berbudaya. Bentuk-bentuk kerukunan tersebut mustahil akan terwujud di negara yang sangat luas dengan berbagai macam suku, ras, bahasa, dan agama seperti NKRI tanpa adanya peran serta dan kontribusi dari seluruh elemen dan lapisan masyarakat, termasuk para PNS/ASN-nya yang memiliki fungsi sebagai pelayan publik, pelaksanan kebijakan publik serta perekat dan pemersatu bangsa.

2.2. Kerukunan dalam Berbudaya

Leluhur bangsa Indonesia adalah orang-orang yang arif serta bijaksana. Budaya serta tradisi dibuat agar kehidupan dalam masyarakat semakin lengkap. Keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia telah melahirkan kekayaan

budaya yang tidak ternilai harganya. Dari Sabang sampai Merauke memiliki bentuk budaya yang beranekaragam sebagai aset bangsa yang sangat berharga.

Pemahaman akan keberagaman budaya ini terus mengalami perkembangan, mulai dari pluralisme hingga munculnya istilah mulitikulturalisme. Pluralisme adalah istilah yang mengacu pada keragaman etnis dan budaya dalam suatu daerah atau negara. Sementara itu, multikulturalisme ditafsirkan sebagai paradigma yang menghendaki adanya persatuan dari berbagai kelompok kebudayaan dengan hak dan status sosial politik yang sama dalam masyarakat modern. Istilah multikultural juga sering digunakan untuk menggambarkan kesatuan berbagai etnis masyarakat yang berbeda dalam suatu negara. Multikulturalisme berasal dari dua kata yaitu *multi* (banyak/beragam) dan *cultural* (budaya atau kebudayaan), yang secara etimologi dapat diartikan sebagai keberagaman budaya. Pengertian budaya yang dimaksudkan disini adalah bukan budaya dalam arti sempit, melainkan budaya dalam arti luas, yang dimaknai sebagai semua dialektika manusia terhadap kehidupannya. Dialektika ini akan melahirkan banyak wajah, seperti sejarah, pemikiran, budaya verbal, bahasa, dan lain-lain.

Keragaman budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia harus dimaknai sebagai sebuah anugerah yang tidak terhingga dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan pemaknaan ini, maka sudah seharusnya setiap elemen bangsa menjaga, memelihara, dan menjunjung tinggi setiap budaya yang ada sebagai sebuah kebanggaan dan modal pembangunan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keragaman budaya yang ada jangan sampai menjadi pemicu terjadinya perpecahan dan disintegrasi bangsa.

Oleh karena itu, kerukunan dalam berbudaya sangat perlu untuk diperhatikan. Sebagai contoh, jika kita berada disuatu tempat yang memiliki budaya yang sangat berbeda dengan budaya dari mana kita berasal, maka sudah kewajiban kita dengan senang hati untuk menghormati budaya setempat, sebagaimana ungkapan sebuah peribahasa yang sangat relevan dalam konteks ini, yaitu: *Dimana tanah dipijak disitu langit dijunjung*.

Kerukunan dalam berbudaya akan terwujud jika setiap unsur masyakarat sesuai dengan peran dan tanggungjawabnya mengembangkan sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling menjunjung tinggi dengan mengedepankan sisi kemanusiaan. Selain itu, perlu juga mengembangkan sikap kewaspadaan dini terhadap upaya-upaya yang berpotensi memecah belah bangsa ini dengan memanfaatkan celah keragaman budaya, baik yang datang dari dalam maupun dari luar.

Pegawai Negeri Sipil sebagai bagian dari elemen masyarakat sekaligus aset bangsa memiliki peran yang sangat strategis dalam rangka membina kerukunan dalam berbudaya sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Kontribusi

PNS dalam wewujudkan kerukunan dalam berbudaya harus didasari sikap Sadar Berbangsa dan Bernegara, yang ditunjukkan dengan : 1) rasa memiliki dan mencintai tanah air sehingga tumbuh jiwa patriotisme dan nasonalisme yang tinggi untuk membawa bangsa ini menuju daya saing nasional; 2) memiliki rasa bangga terhadap budaya bangsa, menghargai dan menghormati keanekaragaman suku, ras serta antar golongan yang ditunjukan dalam pemberian pelayanan publik; 3) memilik semangat gotong royong dan kebersamaan, serta selalu berusaha mewujudkan rasa keadilan sosial sebagai pejabat publik dengan menunjukan sikap berdedikasi, loyal, dan siap berkorban melalui pelaksanaan tugas jabatannya dengan persfektif WoG; dan 4) waspada terhadap pengaruh budaya asing yang dapat mengancam masa depan dan kedaulatan Bangsa.

Sikap-sikap tersebut hendaknya ditunjukkan oleh PNS dalam menjalankan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa sesuai dengan tugas dan jabatannya. Sebagai contoh sikap yang harus dikembangkan adalah dengan sanantiasa bersedia memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua pihak tanpa bersikap diskriminatif dengan membeda-bedakan, ras, suku, budaya dan adat istiadat dan status sosial.

2.3 Kerukunan dalam Beragama

Kerukunan dalam berbudaya sebagaimana telah dijelaskan di atas, kerukunan selanjutnya yang harus terus dikembangkan adalah kerukunan dalam beragama. Undang Undang Dasar 1945 bab IX Pasal 19 Ayat (1) menyiratkan bahwa agama dan syariat agama dihormati dan didudukkan dalam nilai asasi kehidupan bangsa dan negara. Dan setiap pemeluk agama bebas menganut agamanya dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

Keragaman pemeluk agama beragama di NKRI merupakan potensi dan aset dalam pembangunan bangsa sekaligus menjadi potensi yang dapat memicu perpecahan dan disintegrasi bangsa. Oleh karena itu, agar kerukunan keragaman pemeluk agama beragama ini menjadi berkah bagi bangsa Indonesia, maka seluruh elemen masyarakat harus senantiasa berupaya untuk menjaga kerukunan antar pemeluk agama beragama dengan berbagai dinamika tantangan dan hambatan yang akan dihadapi. Untuk itu pemerintah dengan kebijaksanaannya terus melakukan berbagai upaya memberikan pembinaan dan penyadaran bahwa kebebasan beragama mengandung makna tidak membenarkan bagi orang yang beragama untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak dapat dibenarkan kepada pemeluk agama lainnya, sehingga akan tercipta kerukunan antar pemeluk agama beragama.

Jika kerukunan antar pemeluk agama beragama dan antara pemeluk agama beragama dengan pemerintah dapat direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara secara harmonis. Hasil dari kerukunan yang yang

terjadi akan memberikan perhatian dan konsentrasi pemerintah membangun Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur yang diridhai Tuhan Yang Maha Esa akan segera terwujud. Hal tersebut dapat terwujud berkat dukungan pemeluk agama beragama yang mampu hidup berdampingan dengan harmonis. Sekaligus merupakan contoh kongkret kerukunan hidup beragama bagi masyarakat dunia.

Kerukunan dan keharmonisan hidup seluruh masyarakat akan senantiasa terpelihara dan terjamin selama nilai-nilai (UUD1945, Pancasila, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika dipegang teguh secara konsekuen oleh setiap warga negara. Keberanian untuk bersikap terbuka dan jujur dalam serta antar lembaga keagamaan harus terus dikembangkan. Pengembangan itu diantaranya dapat diwujudkan dengan:

1. Peningkatan sosialisasi tentang kerukunan antar pemeluk agama beragama;
2. Melayani dan menyediakan kemudahan bagi penganut agama;
3. Tidak mencampuri urusan akidah/dogma dan ibadah suatu agama;
4. Negara dan pemerintah membantu/membimbing penunaian ajaran agama dan merumuskan landasan hukum yang jelas dan kokoh tentang tata hubungan antar pemeluk agama beragama;
5. Membentuk forum kerukunan antar pemeluk agama beragama;
6. Meningkatkan wawasan kebangsaan dan multikultural melalui jalur pendidikan formal, informal, dan non formal;
7. Meningkatkan pemberdayaan sumber daya manusia (tokoh agama dan tokoh masyarakat) untuk ketahanan dan kerukunan masyarakat pada umumnya dan pemeluk agama pada khususnya;
8. Melindungi agama dari penyalahgunaan dan penodaan; dan
9. Aksi sosial bersama antar pemeluk agama beragama.

Sebagaimana dalam pembinaan kerukunan berbudaya, PNS juga harus menjadi agen penting dalam pembinaan kerukunan pemeluk agama beragama. Sesuai dengan fungsinya, sebagai perekat dan pemersatu bangsa, PNS dapat mengambil peran yang sangat strategis dalam mewujudkan kerukunan dalam beragama, diantaranya: 1) Membuat dan melaksanakan berbagai kebijakan yang mendukung bagi terciptanya kerukunan dalam beragama; 2) Menjadi teladan kerukunan beragama ditengah-tengah masyarakat; dan 3) Menjadi garda terdepan dalam membendung paham-paham yang dapat merusak kerukunan dan keharmonisan pemeluk agama beragama. Tindakan nyata yang dapat dilakukan oleh seorang PNS dalam rangka membina kerukunan dan keharmonisan dalam beragama diantaranya:

1. Memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tanpa membeda-bedakan agama dan keyakinannya.

2. Menghormati rekan kerja dan mitra terkait yang berbeda agama dan keyakinan untuk melaksanakan syariat atau ketentuan agamanya baik saat jam kerja maupun di luar jam kerja.
3. Mengembangkan sikap toleransi dan tenggang rasa.
4. Saling mengingatkan dan menasehati dalam kebaikan.
5. Tidak memaksakan ajaran agama dan keyakinan kepada orang lain yang tidak seagama.

Kesadaran dan bentuk kerukunan dalam rumah tangga serta kerukunan dalam masyarakat dapat digali berdasarkan dua penjelasan kerukunan di atas. Kerukunan secara tidak langsung menjadi pondasi dasar dalam kelangsungan keharmonisan dalam masyarakat.

2.4 Makna dan Pentingnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Dengan pemahaman dan pengamalan kerukunan dalam berbudaya dan beragama yang konsisten baik yang ditunjukan di dalam rumah tangga maupun di masyarakat dari setiap warga negara akan sangat membantu dalam menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis dan demokratis. Demokrasi tidak datang dengan tiba-tiba dari langit. Ia merupakan proses panjang melalui pembiasan, pembelajaran dan penghayatan. Untuk tujuan ini dukungan sosial dan lingkungan demokrasi adalah mutlak dibutuhkan. Kesatuan bangsa Indonesia yang kita rasakan saat ini, itu terjadi dalam proses yang dinamis dan berlangsung lama, karena persatuan dan kesatuan bangsa terbentuk dari proses yang tumbuh dari unsur-unsur sosial budaya masyarakat Indonesia sendiri, yang ditempa dalam jangkauan waktu yang lama sekali.

Unsur-unsur sosial budaya itu antara lain seperti sifat kekeluargaan dan jiwa gotong-royong. Kedua unsur itu merupakan sifat-sifat pokok bangsa Indonesia yang dituntun oleh asas kemanusiaan dan kebudayaan. Karena masuknya kebudayaan dari luar, maka terjadi proses akulturasi (percampuran kebudayaan). Semua unsur-unsur kebudayaan dari luar yang masuk diseleksi oleh bangsa Indonesia.

Kemudian sifat-sifat lain terlihat dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan bersama yang senantiasa dilakukan dengan jalan musyawarah dan mufakat. Hal itulah yang mendorong terwujudnya persatuan bangsa Indonesia. Jadi makna dan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa adalah dapat mewujudkan sifat kekeluargaan, jiwa gotong-royong, musyawarah, dan lain sebagainya. Tahap-tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia itu yang paling menonjol ialah sebagai berikut:

1. Perasaan senasib sepenanggungan
2. Kebangkitan Nasional
3. Sumpah Pemuda

4. Proklamasi Kemerdekaan

2.5 Prinsip-Prinsip Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Setelah memahami makna dan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa, selanjutnya perlu dipahami juga mengenai prinsip-prinsipnya. Hal-hal yang berhubungan dengan arti dan makna persatuan Indonesia apabila dikaji lebih jauh, terdapat beberapa prinsip yang juga harus dihayati serta kita pahami lalu diamalkan.

1. Prinsip Bhineka Tunggal Ika
   Prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, agama dan adat kebiasaan yang majemuk. Hal ini mewajibkan kita bersatu sebagai bangsa Indonesia.
2. Prinsip Nasionalisme Indonesia
   Kita mencintai bangsa kita, tidak berarti bahwa kita mengagung-agungkan bangsa kita sendiri dengan merasa lebih unggul daripada bangsa lain. Kita tidak ingin memaksakan kehendak kita kepada bangsa lain, sebab pandangan semacam ini hanya mencelakakan kita. Selain tidak realistis, sikap seperti itu juga bertentangan dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Prinsip Kebebasan yang Bertanggung jawab
   Manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang secara asasi memiliki kebebasan dan tanggung jawab tertentu terhadap dirinya, sesamanya dan dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa.
4. Prinsip Wawasan Nusantara
   Dengan wawasan itu, kedudukan manusia Indonesia ditempatkan dalam kerangka kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan keamanan. Dengan wawasan itu manusia Indonesia merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional.

5. Prinsip Persatuan Pembangunan untuk Mewujudkan Cita-Cita Reformasi
   Dengan semangat persatuan Indonesia kita harus dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur dengan mewujudkan daya saing bangsa.

2.6 Pengamalan Nilai-Nilai Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Persatuan dan kesatuan bangsa hendaknya tidak sebatas dipahami konsep dan teorinya namun yang lebih penting dari itu semua adalah bagaimana setiap warga negara (tidak terkecuali PNS) mampu mengamalkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa tersebut sesuai dengan kemampuan dan perannya masing-masing. Sesuai dengan fungsinya, PNS memiliki peran yang sangat vital dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, yang perlu ditegakkan dan dilakukan oleh PNS, diantaranya

1. Senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa dan negaradi atas kepentingan pribadi dan golongan;
2. Memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa dengan selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh lapisan masyarakat, tanpa membeda-bedakan ras, suku, budaya, adat istiadat, bahasa, agama, dan status sosial;
3. Berusaha meningkatkan semangat kekeluargaan, gotong-royong dan musyawarah yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan sesuai dengan tugas dan fungsi jabatanya masing-masing.
4. Melaksanan dan berkontribusi dalam pembangunan yang merata serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memberikan perlindungan, jaminan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam setiap kegiatan pelayanan yang diberikan sesua dengan kewenangan jabatan yang dimiliki.
5. Memberikan kontribusi dalam rangka pemperkuat sistem pertahanan dan keamanan sehingga masyarakat merasa terlindungi dengan mengedepankan semangat Bhinneka Tunggal Ika dan semangat kekeluargaan.
6. Menghindari penonjolan perbedaan suku, agama, ras, dan agama (SARA). Karena bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, agama serta adat-istiadat kebiasaan yang berbeda-beda, maka seorang PNS tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan perpecahan, antara lain:
   a. Egoisme
   b. Ekstrimisme
   c. Feodalisme
   d. Sukuisme
   e. Profinsialisme
   f. Tidak taat kebijakan, peraturan dan perundang undangan
   g. Acuh tak acuh tidak peduli terhadap lingkungan
   h. Fanatisme yang berlebih-lebihan

Pengamalan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa yang konsisten akan menimbulkan rasa nasionalisme dan patriotisme yang tinggi bagi seorang PNS kepada bangsa dan negaranya. Dan dapat juga terjadi seBaliknya, dengan rasa nasionalisme dan patriotism yang tinggi dimiliki oleh seorang PNS akan memberikan motivasi untuk secara konsisten mengamalkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa.

Hans Kohn (1955) mendefinisikan nasionalisme sebagai suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan individu tertinggi harus diserahkan pada negara dan perasaan yang mendalam akan ikatan terhadap tanah air sebagai tumpah darah. Dengan kata lain nasionalisme adalah sikap mencintai bangsa dan negaranya sendiri. Nasionalisme terbagi atas :

1. Nasionalisme dalam arti sempit, yaitu sikap mencintai bangsa sendiri secara berlebihan sehingga menggap bangsa lain rendah kedudukannya, nasionalisme ini disebut juga nasionalisme yang *chauvinisme*, contoh Jerman pada masa Hitler.
2. Nasionalisme dalam arti luas, yaitu sikap mencintai bangsa dan negara sendiri dan menggap semua bangsa sama derajatnya.

Ada tiga hal yang harus dilakukan oleh seorang PNS, sebagai bagian dari warga negara untuk membina rasa nasionalismenya, antara lain:

1. Mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni nusantara;
2. Mengembangkan sikap toleransi; dan
3. Memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia

Sedangkan, empat hal yang harus dihindari oleh seorang PNS dalam memupuk sermangat nasionalisme adalah:

1. *Sukuisme*, menganggap suku bangsa sendiri paling baik;
2. *Chauvinisme,* mengganggap bangsa sendiriu paling unggul;
3. *Ektrimisme,* sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara kalau perlu dengan kekerasan dan senjata; dan
4. *Provinsialisme*, sikap selalu berkutat dengan provinsi atau daerah sendiri.

Sikap nasionalisme diperlukan oleh setiap warna negara Indonesia dan PNS sebagai pondasi dari pelayan publik. Bukan saja sikap nasionalisme yang diperlukan, sikap patriotisme juga perlu diterapkan. Sikap patriotisme adalah sikap rela berkorban segala-galanya termasuk nyawa sekalipun untuk

mempertahankan dan kejayaan negara. Ciri-ciri PNS yang memiliki patriotisme yang tinggi adalah:

1. Cinta tanah air;
2. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara;
3. Menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan;
4. Berjiwa pembaharu; dan
5. Tidak kenal menyerah dan putus asa

Sikap patriotisme dalam kehidupan sehari hari dapat diwujudkan dalam bentuk:

1. Dalam kehidupan keluarga: menyaksikan film perjuangan, membaca buku bertema perjuangan, dan mengibarkan bendera merah putih pada hari-hari tertentu.
2. Dalam kehidupan sekolah: melaksanakan upacara bendera, mengkaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai perjuangan, belajar dengan sungguh-sungguh untuk kemajuan.
3. Dalam kehidupan masyarakat: mengembangkan sikap kesetiakawanan sosial di lingkungannya, Memelihara kerukunan diantara sesama warga.
4. Dalam kehidupan berbangsa: meningkatkan persatuan dan kesatuan, melaksanakan Pancasila dan UUD 1945, mendukung kebijakan pemerintah, mengembangkan kegiatann usaha produktif, mencintai dan memakai produk dalam negeri, mematuhi peraturan hukum, tidak main hakim sendiri, menghormati, dan menjunjung tinggi supremasi hukum serta menjaga kelestarian lingkungan.
5. Dalam kehidupan PNS sebagai abdi negara pelayan masyarakat: mengmbangkan sikap berdedikasi, loyal, dan rela berkorban melalui peran dan pekerjaanya sebagai aparatur Negara dengan persfektif WoG dalam memberikan pelayanan publik sehingga tercipta rasa untuk melakukandengan sadar sesuai dengan araha kebijakan pembangunan nasional guna mewujud daya saing bangsa menuju Negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

BAB III
TOLERANSI DALAM BERMASYARAKAT PLURAL

3.1 Toleransi dalam Pluralisme

Toleransi merupakan salah satu bentuk akomodasi tanpa persetujuan yang formil. Kadang-kadang toleransi timbul secara tidak sadar dan tanpa direncanakan, hal mana disebabkan karena adanya watak orang perorangan atau kelompok manusia, untuk sedapat mungkin menghindarkan diri dari suatu perselisihan (Soekanto, 1982). Dari sejarah dikenal bangsa Indonesia adalah bangsa yang toleran yang sedapat mungkin menghindarkan diri dari perselisihan-perselisihan. Halim (2008) dalam artikel yang berjudul "Menggali Oase Toleransi" yang menyatakan "Toleransi berasal dari bahasa latin, yaitu *tolerantia*, berarti kelonggaran, kelembutan hati, keringanan dan kesabaran". Secara umum istilah ini mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, suka rela, dan kelembutan. *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) mengartikan toleransi sebagai sikap "saling menghormati, saling menerima, dan saling menghargai ditengah keragaman budaya, kebebasan berekspresi, dan karakter manusia". Untuk itu, toleransi harus didukung oleh cakrawala pengetahuan yang luas, bersikap terbuka, dialog, kebebasan berfikir, dan beragama. Singkatnya toleransi setara dengan sikap positif dan menghargai orang lain dalam rangka menggunakan kebebasan asasi sebagai manusia.

Ada dua model toleransi, yaitu: **Pertama,** toleransi pasif merupakan suatu sikap menerima perbedaan sebagai sesuatu yang bersifat faktual. **Kedua,** toleransi aktif merupakan suatu sikap melibatkan diri dengan yang lain ditengah perbedaan dan keragaman. Toleransi aktif merupakan ajaran semua agama. Hakikat toleransi adalah hidup berdampingan secara damai dan saling menghargai diantara keragaman. Di Indonesia, praktek toleransi mengalami pasang surut. Pasang surut ini dipicu oleh pemahaman *distingtif* yang bertumpu pada relasi "mereka" dan "kita". Tak pelak, dalam berbagai kontemporer, sering dikemukakan bahwa, radikalisme, ekstremisme, dan fundamentalisme merupakan baju kekerasan yang ditimbulkan oleh pola pemahaman yang eksklusif dan antidialog atas teks-teks keagamaan. Seluruh agama harus bertanggung jawab untuk mewujudkan keadilan dan kedamaian. Hal ini tidak akan tercapai hanya dengan mengandalkan teologi eksklusif yang hanya berhenti pada klaim kebenaran, tetapi membutuhkan teologi pluralisme yang berorientasi pada pembebasan.

Merujuk dari pemaparan di atas, Toleransi yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah: sikap saling menghormati, saling menghargai, dan saling menerima ditengah keragaman budaya, suku, agama dan kebebasan berekspresi. Dengan

adanya sikap toleransi, warga suatu komunitas dapat hidup berdampingan secara damai, rukun, dan bekerja sama dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di lingkungannya. Toleransi sebagai pondasi keharmonisan suatu bangsa dan masyarakatnya sebagai individu.

3.2 Masyarakat Plural

Kita perlu menyelamatkan bangsa dan negara dengan kemBali kepada nilai-nilai luhur yang pasti melekat pada sebagian besar orang, kelompok, dan masyarakat di negeri ini. Persoalannya tidak setiap orang atau kelompok yang mau mengakui pluralisme dan multikulturalisme. Padahal dengan saling mengenal, kelompok masyarakat yang plural dapat mengembangkan apresiasi, penghormatan, bahkan kerjasama antara yang satu dengan yang lain (A'la, 2008). Subkhan (2007) menyatakan pluralisme tidak semata menunjuk pada kenyataan tentang adanya kemajemukan. Namun, yang dimaksud adalah keterlibatan aktif terhadap kenyataan kemajemukan tersebut. Pluralisme agama dan budaya dapat dijumpai dimana-mana.

Di dalam masyarakat tertentu, dikantor tempat kita bekerja, di sekolah tempat kita belajar, bahkan di pasar tempat kita berbelanja. Tapi seseorang baru dapat dikatakan menyandang sifat tersebut apabila ia dapat berinteraksi positif dalam lingkungan kemajemukan tersebut. Dengan kata lain pluralisme agama adalah bahwa tiap pemeluk agama dituntut bukan saja mengakui keberadaan dan persamaan guna tercapainya kerukunan dalam kebhinekaan.

Intan (2007) menyatakan pluralisme agama yang berpondasikan solidaritas individual niscaya membuahkan beberapa implikasi positif: **Pertama,** Pemahaman kemajemukan agama bukan lagi sekedar "kenyataan", melainkan menjadi "keharusan" yang tidak dapat dihilangkan. Pada realitas ini muncul usaha saling memperhatikan yang lahir dari kesadaran interpendensi. Pada kondisi ini, agama di dorong memberi kontribusi karena interdependensi agama mensyaratkan ketidakaktifan satu agama akan berpengaruh kepada hasil-hasil yang akan dicapai. Jika kesadaran interdependensi agama terus bertumbuh, partisipasi agama-agama dapat dimaksimalkan.

Kedua, pluralisme agama berbasis solidaritas intelektual menjunjung prinsip *take and give*. Dialog yang baik akan menghasilkan perubahan kedua belah pihak.

Ketiga, berdasarkan solidaritas intelektual, pluralisme agama mengharuskan kebebasan beragama bukan sebatas negatif *immunity,* bahwa agama harus bebas dari cengkraman sosial-politik termasuk negara.

Keempat, Pluralisme agama dengan solidaritas intelektual berpotensi menghasilkan nilai-nilai yang mengandung *common good*. Yang dimaksudkan dengan masyarakat plural dalam tulisan ini, adalah masyarakat majemuk yang

ditandai adanya beragam suku bangsa, agama, budaya atau adat istiadat. Kondisi masyarakat yang demikian diperlukan kerjasama dengan sikap toleransi dalam menghadapi berbagai tantangan untuk memperkuat ketahanan sosial suatu komunitas.

Pada masyarakat majemuk atau plural, secara horizontal ditandai dengan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, perbedaan agama, adat, dan perbedaan kedaerahan, dan sebagainya. Sedangkan ditinjau secara vertikal ternyata adanya perbedaan yang mencolok antara lapisan atas dengan lapisan bawah. Kondisi masyarakat yang demikian akan mudah munculnya berbagai kerusuhan berupa konflik antar etnis, konflik atas nama agama, dan adanya kecemburuan sosial yang disebabkan adanya kesenjangan yang cukup tajam antara golongan kaya dan miskin.

Apabila suatu masyarakat atau komunitas tidak mampu mencegah atau mengelola konflik dan kekerasan serta tidak mampu melindungi warga masyarakatnya yang rentan. Hal ini mencerminkan lemahnya ketahanan sosial masyarakat tersebut. Solusi yang ditawarkan, yaitu dengan pendekatan toleransi**.** Sebagai nilai kebijakan dalam kehidupan bersama. Misrawi (2008) mengutip pendapat Rainer Forst dalam *Tolerantion and Democracys* (2007) menyebutkan, ada dua cara pandang tentang toleransi yaitu konsep yang dilandasi pada otoritas negara (*permission conception)* dan konsepsi yang dilandasi pada kultur dan kehendak untuk membangun pengertian dan penghormatan terhadap yang lain (*respect conception).* Dalam hal ini, Forst lebih memilih konsep kedua, yaitu toleransi dalam kontek demokrasi harus mampu membangun saling pengertian dan saling menghargai ditengah keragaman suku, agama, ras, dan bahasa.

Untuk membangun toleransi sebagai nilai kebijakan setidak ada dua modal yang dibutuhkan yaitu: **Pertama,** toleransi membutuhkan interaksi sosial melalui percakapan dan pergaulan yang intensif. **Kedua,** membangun kepercayaan diantara berbagai kelompok dan aliran. Prinsip dasar semua agama adalah toleransi, karena semua agama pada dasarnya mencintai perdamaian dan anti kekerasan (Christopher, 2005).

Pada masyarakat majemuk atau plural, secara horizontal ditandai dengan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, perbedaan agama, adat, dan perbedaan kedaerahan, dan sebagainya. Solusi yang ditawarkan, yaitu dengan pendekatan toleransi sebagai nilai kebijakan dalam kehidupan bersama.

3.3 Agama dalam Masyarakat Multikultural

Menurut MacIver, masyarakat dibentuk oleh struktur yang tidak kelihatan dan merupakan kumpulan dari beragam hubungan manusia yang dibangun dan

diubah oleh manusia itu sendiri. Masyarakat bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan jaman.

Dalam masyarakat sederhana atau primitif, manusia memiliki karakteristik yang serba homogen baik dalam budaya, agama maupun struktur sosial. Agama yang dipahami oleh masyarakat seperti ini adalah agama yang dekat dengan simbol-simbol. Simbol-simbol ini memiliki peran dominan terhadap keberagamaan mereka. Kebanyakan dari masyarakat sederhana ini berpendidikan rendah atau dalam lingkup ordinary people. Mereka memahami agama orang lain dengan perasaan antipati. Toleransi yang dikembangkan dalam masyarakat ini tidak terjalin atau berjalan normal. Mereka mudah tersentuh atau tersinggung bila ajaran keyakinan agama mereka sepertinya dihina oleh pemeluk agama lain. Mereka merespon langsung dengan mempertahankan taruhan jiwa. Mereka memahami agama orang lain dengan sikap antipati.

Masyarakat kompleks atau masyarakat multikultural tersusun dari keanekaragaman budaya, masyarakat dan struktur sosial. Keanekaragaman adalah fakta yang tidak bisa dielakkan dalam kehidupan kolektif dan tidak bisa diharapkan eksistensinya atau tidak dapat ditekan tanpa tingkat kekerasan yang bisa diterima. Terlebih lagi sejak manusia terikat dan dibentuk oleh kebudayaan yaitu penghormatan diri. Penghormatan diri secara melekat sejak mereka dilahirkan terikat secara erat dengan penghormatan pada kebudayaannya. Penghormatan pada kebudayaan ini menumbuhkan rasa kesetiaan, memberi rasa percaya diri, dan keberanian untuk berinteraksi dengan kebu- dayaan lain.

Karakter interaksi antar kebudayaan dalam masyarakat multikultural adalah terjadinya asimilasi kebudayaan. Begitu juga dalam hal keberagamaan. Orang-orang yang hidup dalam masyarakat multikultural berasimilasi mengenai bagaimana keberagamaan yang baik dalam masyarakat dengan komposisi kepercayaan pemeluk agama yang heterogen. Hal ini menciptakan rasa toleransi dan kerjasama antar budaya dan agama.

Proses asimilasi ini muncul bukan hanya untuk kelompok minoritas tetapi juga untuk kelompok mayoritas. Mereka beranggapan bahwa masyarakat memiliki struktur moral dan kebudayaan yang padu serta koheren. Hal seperti ini jarang menjadi permasalahan. Meskipun struktur moral dan kebudayaan masyarakat memiliki koherensi internal, struktur itu tidak sepenuhnya sama dan padu. Struktur tersebut berbeda-beda menurut kelas, agama, wilayah, dan disusun dari bermacam-macam rangkaian pemikiran bahkan yang bertentangan. Terdapat pula pemikiran terdiri dari nilai-nilai dan praktek-praktek yang dapat ditafsirkan dan dihubungkan dengan beberapa cara yang berbeda.

Pemikiran yang berbeda dan bertentangan memberikan suatu cela terhadap pemikiran baru dan mencetuskan suatu golongan. Salah satunya adalah golongan assimilasionis. Golongan assimilasionis mengabaikan semua ini dan menawarkan

satu pandangan yang sangat sempit dan menyimpang tentang kebudayaan nasional atau menyamakan struktur kelompok minoritas dengan kelompok yang lebih dominan.

Dalam masyarakat multikultural, pengikut atau pemeluk agama memainkan peranan dominan bagi ajaran agama yang dipeluknya atau bahkan diantara mereka ada sekelompok orang yang acuh terhadap agama yang mereka peluk. Kenyaataan seperti ini akan mengganggu dan juga sekaligus membantu memahami keberadaan suatu agama dengan pemeluk agamanya.

Ada dua kelompok masyarakat beragama dalam masyarakat multikultural, yaitu masyarakat beragama *educated people* dan masyarakat beragama *ordiniary people*. Kedua, masyarakat beragama ini berbeda dalam memperlakukan agama yang mereka peluk. Bagi masyarakat beragama *educated people,* memahami ajaran agama harus mengikutsertakan analisis rasional dan mengkesampingkan pemahaman intuitif dan simbolik. Mereka mudah diajak bertoleransi terhadap agama dan pemeluk agama lain. SeBaliknya, masyarakat beragama *ordiniary people* memahami ajaran agama penuh dengan simbol-simbol dan tidak mempergunakan analisis rasional. Mereka mudah tersulut emosi dan sangat susah bertoleransi dengan agama dan pemeluk agama lain. Kelompok ini mudah digerakkan oleh sekelompok orang atau komunitas baik yang beraliansi pada politik maupun pada sosial budaya.

3.4 Toleransi Beragama dalam Masyarakat Multikultural

Dalam masyarakat multikultural yang identik dengan masyarakat serba majemuk baik dalam politik, budaya atau bahkan agama. Manusia beragama cenderung mengalami konflik akibat adanya berbagi kepentingan yang dihadapinya. Kelompok beragama yang secara ekonomi kuat akan mampu dianggap lemah dalam bidang perekonomian merasa tersisih dan terpinggirkan akibat tidak bisa bersaing dengan kelompok bergama yang kuat dari sisi ekonomi. Kelompok ini dalam menjalankan ekonominya berupaya mengimbangi kelompok kuat dan memasukkan nilai-nilai supranatural. Dengan begitu, mereka merasa kuat secara kualitas spiritual sekalipun dalam skala kuantitas ekonomi kecil.

Kenyataan seperti di atas adalah respon yang mendasar dari kelompok kecil. Respon ini bisa muncul dalam bentuk kelompok fundamentalis. Kelompok ini bereaksi untuk menjawab kelompok yang kuat dalam sistem perekonomian dengan menggulirkan berbagai konsep konservatif, ortodoks atau tradisional menuju konsep-konsep fundamentalis modern. Mereka masuk dalam area masyarakat sipil, dunia permodalan, dan universitas-universitas.

Sekalipun kelompok fundamentalis modern seperti ini secara ekonomi lemah, namun ia memiliki berbagai strategi kuat dalam media informasi yang menginspirasi berbagai kecenderungan militansi keagamaannya. Mereka

menguasai berbagai jaringan telekomunikasi canggih dan mampu menyebarkan gagasan ideologisnya untuk menghancurkan kekuatan jumlah besar. Mereka bekerja untuk agama dan kepentingan politik keagamannya.

Dalam masyarakat multikultural, pengikut atau pemeluk agama memainkan peranan dominan bagi ajaran agama yang dipeluknya atau bahkan di antara mereka ada sekelompok orang yang acuh terhadap agama yang mereka peluk. Kenyaatan seperti ini akan mengganggu dan juga sekaligus membantu memahami keberadaan suatu agama dengan pemeluk agamanya.

Keragaman agama-agama yang muncul dalam suatu masyarakat multikultural baik yang memiliki sistem pemerintahan republik atau monarki, perbedaan sering menjadi pemicu munculnya berbagai hambatan mengalahkan kelompok agama yang lemah secara ekonomi. Pada sisi lain kelompok yang batan dalam kohesi sosial. Perbedaan agama tersebut telah meletakkan pemahaman keagamaan dalam kerangka dua kubu pemeluk agama beragama: *satu*, kubu pemeluk agama beragama tuan rumah; dan *kedua*, kubu pemeluk agama beragama pendatang. Kubu pemeluk agama beragama tuan rumah biasanya memiliki kuantitas pemeluk agama yang mayoritas, sedangkan kubu pemeluk agama beragama pendatang biasanya menduduki posisi minoritas. Kedua kubu ini saling bertubrukan dalam pergaulan sosial, bila di antara mereka menjadikan perbedaan agama sebagai hambatan dalam mengintegrasikan nilai-nilai suatu bangsa atau masyarakat.

Munculnya kesadaran antar pemeluk agama beragama yang diwujudkan dalam toleransi bisa menekan atau meminimalisasi bentrokan di antara mereka. Moto *agree in disagreement* menjadi modal sosial yang kuat dalam toleransi beragama. Toleransi beragama yang dikembangkan bukan hanya menghargai teologi dan iman masing-masing agama dan pemeluk agama beragama. Akan tetapi, memahami dan menghargai budaya dari pemeluk agama beragama tersebut. Toleransi beragama mampu memberikan dukungan bagi terbentuknya masyarakat madani yang diinspirasi oleh nilai-nilai supra-natural.

Ada dua tipe toleransi beragama: *pertama,* toleransi beragama pasif, yakni sikap menerima perbedaaan sebagai sesuatu yang bersifat faktual. *Kedua*, toleransi beragama aktif, yakni toleransi yang melibatkan diri dengan yang lain di tengah perbedaan dan keragaman. Toleransi aktif merupakan ajaran semua agama. Hakekat toleransi adalah hidup berdampingan secara damai dan saling menghargai di antara keragaman. Praktek toleransi di sebuah negara sering mengalami pasang surut. Pasang surut ini dipicu oleh pemaknaan distingtif yang bertumpu pada relasi “mereka” dan “kita”.

Toleransi beragama yang dilakukan dengan penuh kesadaran akan melahirkan sikap inklusif pemeluk agama bergama. Sikap ini menganggap agama sendiri benar tetapi masih memberikan ruang untuk menyatakan kebenaran agama

lain yang diyakini benar oleh pemeluk agamanya. Sikap inklusif pemeluk agama beragama akan mampu meruntuhkan sikap ekstrimis dan eksklusif pemeluk agama beragama, yang biasanya melahirkan pemahaman fanatik buta dan radikalisme bahkan terorisme yang abadi terhadap pemeluk agama berbeda agama.

Toleransi itu cukup mesyaratkan adanya sikap membiarkan dan tidak menyakiti orang atau kelompok lain, baik yang berbeda maupun yang sama. Toleransi ditumbuhkan oleh kesadaran yang bebas dari segala macam bentuk tekanan atau pengaruh serta terhindar dari hipokrisis. Toleransi mengandung maksud untuk memungkinkan terbentuknya sistem yang menjamin keamanan pribadi, harta benda, dan unsur-unsur minoritas yang terdapat dalam masyarakat. Ini direalisasikan dengan menghormati agama, moralitas, dan lembaga-lembaga mereka serta menghargai pendapat orang lain dan perbedaan-perbedaan yang ada di lingkungannya tanpa harus berselisih dengan sesamanya hanya karena berbeda keyakinan atau agama. Dalam kaitan dengan agama, toleransi mencakup masalah-masalah keyakinan pada diri manusia yang berhubungan dengan akidah atau yang berhubungan dengan ketuhanan yang diyakininya. Seseorang harus diberikan kebebasan untuk meyakini dan memeluk agama (mempunyai akidah) masing-masing yang dipilihnya serta memberikan penghormatan atas pelaksanaan ajaran-ajaran yang dianut atau diyakininya.

3.5 Tripologi dalam Beragama

Komarudin Hidayat menyebutkan ada lima tipologi sikap keberagamaan, yakni "eksklusivisme, inklusivisme, pluralisme, eklektivisme, dan universalisme". Masing-masing dari kelima tipologi ini tidak berarti saling terlepas dan terputus satu sama lainnya dan tidak pula permanen, tetapi lebih tepat dikatakan sebagai sebuah kecenderungan menonjol, mengingat setiap agama maupun sikap keberagamaan senantiasa memiliki potensi untuk melahirkan kelima sikap di atas.

Sekalipun terdapat perbedaan tipe-tipe teologis keberagamaan di antara para pengaji agama-agama Panikkar, misalnya, menyebut tiga tipologi: eksklusif, inklusif, dan paralelisme tetapi secara esensial penyebutan tipologi-tipologi itu mengandung makna dan pengertian yang sama. Oleh karena itu, kita akan membahas tipologi-tipologi beragama itu.

3.5.1 Eksklusivisme

Sikap eksklusivisme melahirkan pandangan bahwa ajaran yang paling benar hanyalah ajaran agama sendiri, sedangkan agama lain sesat dan wajib dikikis, atau pemeluknya dikonversi, sebab agama dan penganutnya terkutuk dalam pandangan Tuhan. Sikap ini merupakan pandangan yang dominan dari zaman ke zaman dan terus dianut hingga dewasa ini. Tuntutan kebenaran yang dipeluknya

mempunyai ikatan langsung dengan tuntutan eksklusivitas. Artinya, kalau suatu pernyataan dinyatakan maka pernyataan lain yang berlawanan tidak bisa benar.

Menurut Nurcholish Madjid, bagi sikap keberagamaan eksklusif ini, agama-agama lain adalah jalan yang salah, yang menyesatkan bagi para pemeluknya. Paradigma ini merupakan pandangan yang dominan dari zaman ke zaman dan terus dianut hingga dewasa ini: "Agama sendirilah yang paling benar, yang lain salah".

Bagi agama Kristen, inti pandangan eksklusivisme adalah bahwa Yesus adalah satu- satunya jalan yang syah untuk keselamatan. *"Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku"* (Yohanes 14: 6). Juga, dalam ayat lain (Kisah Para Rasul 4: 12) disebutkan "*Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan*".

Menurut Budhy Munawar Rachman, dalam kasus Islam, sekalipun tidak ada semacam kuasa gereja dalam agama Kristen, khususnya Katolik yang bisa memberi fatwa menyeluruh seperti contoh di atas, banyak penafsir sepanjang masa yang menyempitkan Islam pada pandangan-pandangan eksklusif. Beberapa ayat yang biasa dipakai sebagai ungkapan eksklusifitas Islam itu antara lain: Hari ini orang kafir sudah putus asa untuk mengalahkan agamamu. *Janganlah kamu takut kepada mereka; takutlah kepada-Ku. Hari ini Ku-sempurnakan agamamu bagimu dan Ku-cukupkan karunia-Ku untukmu dan Ku-pilihkan Islam menjadi agamamu* (QS Al-ma'idah ayat 3). Kemudian ayat yang berbunyi "*Barangsiapa menerima agama selain Islam (tunduk kepada Allah) maka tidaklah akan diterima dan pada hari akhirat ia termasuk golongan yang rugi"* (QS Al-'imran ayat 85).

Namun begitu, kata Komarudin Hidayat, sikap eksklusif, yakni merasa agama sendiri paling baik dan benar, sementara yang lain tidak masuk hitungan, tidaklah selamanya salah dalam beragama. Dalam pengertiannya sebagai sikap agnostik, tidak toleran, dan mau menang sendiri, eksklusifisme tentu tidak dibenarkan oleh etika agama manapun di dunia. Tetapi, jika yang dimaksud dengan eksklusif adalah berkenaan dengan kualitas, mutu, atau keunggulan suatu produk atau ajaran agama dengan dukungan bukti-bukti dan argumen yang *fair*. Maka setiap manusia sesungguhnya mencari agama yang eksklusif dalam arti *excellent* tersebut, sesuai dengan selera dan keyakinannya.

Hanya saja, dalam jargon hidup politik modern, bersikap hidup eksklusif mengandung makna suatu sikap hidup yang mengabaikan sikap hidup pluralistik, yakni sikap hidup yang benar dan oleh sebab itu merupakan sikap hidup manusia yang beriman. Sikap ini dapat menimbulkan kesukaran-kesukaran. *Pertama*, ia membawa bahaya yang nyata akan intoleransi, kesombongan, dan penghinaan

terhadap yang lain. *Kedua*, sikap ini pun mengandung kelemahan intrinsik karena mengandaikan konsepsi kebenaran yang seolah logis secara murni dan sikap yang tidak kritis terhadap kenaifan epistimologis. Friedrich Heiler, seorang ahli Ilmu Perbandingan Agama dari Marburg, menyatakan bahwa secara tradisional tradisi agama Barat adalah eksklusif dalam sikap mereka terhadap agama-agama lain dengan memberikan kepada agama mereka sendiri validitas mutlak.

Terlepas dari adanya kelemahan dalam sikap eksklusif penganut suatu agama, komitmen dan sikap tegas dalam memelihara dan mempertahankan kebenaran agamanya biasanya dapat dipandang positif. Sebab, sikap eksklusif tidak selamanya bisa disalahkan atau dipandang negatif; sikap eksklusif seseorang lebih banyak disebabkan oleh faktor kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang agamanya, atau bahkan oleh pengaruh lingkungan sosial dan kultural tempat ia hidup, yang turut membentuk cara ia menjalankan agamanya.

3.5.2 Inklusivisme

Inklusivisme merujuk pada sikap dan pandangan keberagamaan seseorang bahwa di luar agama yang dipeluknya juga terdapat kebenaran, meskipun tidak seutuh atau sesempurna agama anutannya. Di sini masih didapatkan toleransi teologis dan iman. Menurut Nurcholish Madjid, sikap inklusif memandang agama-agama lain sebagai bentuk implisit dari agama kita.

Paradigma keberagamaan inklusif membedakan antara *salvific presence* (kehadiran yang membawa kepada keselamatan) dan aktifitas Tuhan yang terdapat dalam tradisi- tradisi agama lain, dimana penyelamatan dan aktifitas Tuhan sepenuhnya dalam Yesus Kristus. Menjadi "inklusif" berarti percaya bahwa seluruh kebenaran agama non-Kristiani mengacu kepada Kristus. Paradigma ini, membaca agama orang lain dengan kacamata sendiri. Sikap beragama inklusif ini juga bisa berarti memasukkan orang lain dalam kelompok kita.

Pandangan yang paling ekspresif dari paradigma inklusif ini tampak pada dokumen Konsili Vatikan II, yang mempengaruhi seluruh komunitas Katolik sejak 1965. Dokumen yang berkaitan dengan pernyataan inklusif dalam kaitan dengan agama lain, ada pada *"Deklarasi tentang Hubungan Gereja dan Agama-agama Non-Kristiani"*.

Teolog terkemuka yang menganut aliran ini adalah Karl Rehner, yang pandangan- pandangannya termuat dalam karya terbesar- nya *the Theological Investigation* yang berjilid 20, dalam *"Christianity and the Non-Chris-tian Religions"*, jilid 5. Persoalan yang diketengahkannya adalah *bagaimana* terhadap orang-orang yang hidup sebelum karya penye- lamatan itu hadir, atau orang-orang sesu- dahnya tetapi tidak pernah tersentuh oleh Injil? Di sini, Rahner memunculkan istilah inklusif, *the Anonymous Christian* (Kristen anonim), yaitu orang-orang non-Kristen. Menurut pandangannya, Kristen anonim juga akan

selamat, sejauh mereka hidup dalam ketulusan hati terhadap Tuhan, karena karya Tuhan pun ada pada mereka, walaupun mereka belum pernah mendengar Kabar Baik.

Dalam contoh Islam, juga sering dikemukakan misalnya istilah dari seorang filsuf Muslim abad XIV, Ibn Taymiyah, yang membedakan antara orang-orang dan agama Islam umum (non-Muslim *par exellance*), serta orang-orang dan agama Islam khusus (Muslim *par exellence*). Kata Islam sendiri di sini diartikan sebagai "sikap pasrah kepada Tuhan". Mengutip Ibn Taymiyah, "semua nabi dan pengikut mereka seluruhnya disebut oleh Allah adalah orang-orang Muslim".

Hal itu sebagaimana dalam Alquran (QS. Ali 'Imran ayat 85), *"Barangsiapa yang menganut suatu din selain al-Islam maka tidak akan diterima daripadanya al-din dan di akhirat ia termasuk yang merugi"*. Dan firman-Nya, *"sesungguhnya al-din di sisi Allah ialah al-Islam"* (QS Ali 'Imran ayat 19). Menurut tafsir penganut "Islam Inklusif", sekalipun para nabi mengajarkan pandangan hidup yang disebut *al-Islam*, hal itu tidak berarti bahwa mereka dan kaumnya menyebut secara harfiah agama mereka *al-Islam* dan mereka sendiri sebagai orang-orang Muslim. Itu semua hanyalah peristilahan bahasaArab. Para nabi dan rasul, dalam dakwah mereka pada dasarnya menggunakan bahasa kaumnya masing-masing. Alquran (QS Ibrahim ayat 4) menegaskan, bahwa *"Kami tidak mengutus seorang Rasul kecuali dengan bahasa kaumnya."* Dengan demikian, kalangan Islam inklusif menganut suatu pandangan bahwa agama semua nabi adalah satu.

Sikap inklusif cenderung menginterpretasikan kemBali pelbagai hal dengan cara sedemikian rupa, sehingga hal-hal tersebut tidak saja cocok tetapi juga dapat diterima. Sikap demikian akan membawa ke arah universalisme dengan ciri eksistensial atau formal ketimbang isi esensialnya. Suatu kebenaran doktrinal hampir tidak dapat diterima sebagai universal jika ia terlalu bersikeras mempertahankan isinya yang spesifik, karena penyerapan isi selalu mengandaikan perlunya suatu '*forma mentis*' yang khusus. Sikap menerima yang toleran akan adanya tataran-tataran yang berbeda, seBaliknya akan lebih mudah dicapai. Sementara, suatu pola payung atau struktur formal dapat dengan mudah merangkul sistem-sistem pemikiran yang berbeda.

Sikap inklusivitas memuat kualitas keluhuran budi dan kemuliaan tertentu. Anda dapat mengikuti jalan anda sendiri tanpa perlu mengutuk yang lain. Ibadah anda dapat menjadi konkrit dan pandangan anda dapat menjadi universal. Tetapi, pada sisi lain, sikap inklusivitas pun membawa beberapa kesulitan: *Pertama*, ia juga menimbulkan bahaya kesombongan, karena hanya andalah yang mempunyai *privileg* (hak istimewa) atas penglihatan yang meliputi semua dan sikap toleran; andalah yang menentukan bagi yang lain tempat yang harus mereka ambil dalam alam semesta. *Kedua*, jika sikap ini menerima ekspresi

‘kebenaran agama’ yang beraneka ragam sehingga dapat merengkuh sistem-sistem pemikiran yang paling berlawanan sekalipun, maka ia terpaksa menjadikan kebenaran bersifat relatif murni. Kebenaran dalam arti ini tidak mungkin mempunyai isi intelektual yang independen, karena berbeda atau berlainan dengan orang lain.

3.5.3 Pluralisme atau Paralelisme

Panikkar dan Budhy Munawar Rachman masing-masing menyebutkan istilah *pluralisme* dan *paralelisme*. Sikap teologis *paralelisme* bisa terekspresikan dalam macam-macam rumusan, misalnya:“agama-agama lain adalah jalan yang sama-sama sah untuk mencapai Kebenaran yang Sama”; “agama-agama lain berbicara secara berbeda, tetapi merupakan Kebenaran-kebenaran yang sama sah”; atau “setiap agama mengekspresikan bagian penting sebuah kebenaran”.

Paradigma ini percaya bahwa setiap agama mempunyai jalan keselamatan sendiri. Karena itu, klaim kristiani bahwa ia adalah satu-satunya jalan (*eksklusif*), atau yang melengkapi atau mengisi jalan yang lain (*inklusif*), harus ditolak demi alasan-alasan teologis dan feno- menologis.

Menurut Komarudin Hidayat, sikap pluralisme lebih moderat dari sikap inklusivisme, atau bahkan dari eksklusivisme. Ia berpan- dangan bahwa secara teologis pluralitas aga- ma dipandang sebagai suatu realitas niscaya yang masing-masing berdiri sejajar (*paralel*) sehingga semangat misionaris atas dakwah dianggap tidak relevan.

BAB IV
DESA DAN PARIWISATA

4.1 Desa Pariwisata

Salah satu optimalisasi desa dilakukan dengan mengubah desa biasa menjadi desa wisata. Dalam bentuk ini dilakukan pengembangan pariwisata yang tidak dilepaskan dari ciri kegiatan masyarakat perdesaan yang telah ada, baik aspek ekonomi maupun sosial budaya. Dalam pengembangan desa menjadi desa wisata, selain dilakukan identifikasi terhadap unsur-unsur yang ada di desa juga harus diikuti dengan pemahaman terhadap karakteristik serta tatanan sosial budaya masyarakat.

Pemahaman ini dilakukan agar dapat ditemukan dan dikenali karakter dan kemampuan masyarakat Desa yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan aspek perekonomian desa tersebut. Dengan menemukan dan mengenal karakter dan kemampuan masyarakat dapat ditentukan jenis dan tingkatan pemberdayaan masyarakat agar tepat dan berhasil guna. Di samping itu, untuk menemukan dan mengenali tingkat kesediaan masyarakat menerima kegiatan wisata yang akan dikembangkan di wilayah tersebut sebagai bentuk partisipasi masyarakat.

Partisipasi lokal sangat penting untuk keberhasilan industri pariwisata karena mereka dapat dianggap sebagai salah satu produk pariwisata dan masukan mereka dalam proses pengambilan keputusan pembangunan pariwisata harus menjadi titik fokus (Choi & Sirikaya, 2005). Namun, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa masyarakat setempat gagal berpartisipasi dan bahkan memaksimalkan manfaat dari pariwisata (Scheyvens, 2003; Perancis, 1998). Dalam mengorganisir fakta yang berkaitan dengan hambatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pembangunan pariwisata di negara berkembang, (Tosun, 2000) telah membagi mereka menjadi tiga judul utama: (i) keterbatasan operasional, (ii) keterbatasan struktural, dan (iii) keterbatasan budaya.

Dari faktor hambatan tersebut tidak hanya terjadi pada desa wisata lainnya. Keterbatasan operasional meliputi sentralisasi publik Administrasi pariwisata, kurangnya koordinasi, dan kurangnya informasi. Untuk keterbatasan struktural, diantaranya sikap profesional, kurangnya keahlian, dominasi elit, kurangnya sistem hukum yang tepat, kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, biaya yang relatif tinggi, dan kurangnya sumber daya keuangan. Terakhir, keterbatasan budaya mencakup wilayah terbatasnya kapasitas masyarakat miskin, apatis, dan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat setempat.

Hambatan budaya adalah rintangan tertinggi yang membatasi partisipasi masyarakat. Temuan baru menunjukkan bahwa cuaca penghalang lain yang

menghambat partisipasi masyarakat lokal karena mereka dipisahkan di beberapa desa dan sebagian besar bergantung pada transportasi air. Temuan menunjukkan bahwa budaya merupakan faktor internal, sementara operasional dan struktural adalah hambatan eksternal yang menghambat partisipasi masyarakat.

Hambatan internal terkait dengan faktor-faktor yang dapat dikendalikan oleh masyarakat setempat sementara hambatan eksternal berada di luar yurisdiksi mereka. Dalam rangka mendorong partisipasi lokal, semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan pariwisata perlu bekerja sama. Untuk faktor internal yaitu hambatan budaya, masyarakat setempat harus memiliki semangat untuk mengubah sikap mereka dan melihat pariwisata sebagai sesuatu yang memotivasi mereka. Selain itu, masyarakat setempat juga harus mengatasi keterbatasan kapasitas bagi mereka untuk berpartisipasi. Masyarakat setempat perlu menyadari hak-hak mereka untuk menyuarakan pendapat terkait lingkungan hidup mereka karena mereka adalah salah satu yang akan terkena dampak pembangunan pariwisata. Untuk faktor eksternal yaitu hambatan operasional dan struktural, pemangku kepentingan lain lokal, sektor swasta, serta LSM perlu mengubah persepsi mereka dan menciptakan ruang bagi masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata. Prinsip pembagian kekuasaan perlu dilakukan untuk mengembangkan pulau dengan cara yang berkelanjutan yang dapat memuaskan setiap pihak yang terlibat.

Hasil pemikiran dalam penelitian ini adalah adanya sembilan faktor penghambat yang dirumuskan kedalam beberapa tipe-tipe hambatan seperti; Tipe hambatan *operational*: 1). Keengganan pemegang saham terhadap berbagi kekuasaan, 2). Sentralisasi administrasi publik, 3). Kurangnya informasi; Tipe Hambatan *structural*: 4). Dominasi Elite, 5). Kurangnya sumber daya keuangan, 6). Sikap profesional, 7). Kurangnya hukum yang sesuai sistem; Tipe hambatan *cultural*: 8). Terbatasnya kemampuan masyarakat orang miskin dan, 9). Apatis dan rendahnya tingkat kesadaran di komunitas lokal. Namun, dalam jurnal tersebut tidak dijelaskan secara lebih jauh siapa-siapa saja pihak eksternal yang bepengaruh terhadap partisipasi masyarakat serta budaya apa yang mengekang mereka untuk ikut serta dan secara lebih jauh dampaknya terhadap masyarakat.

4.2 Potensi Desa dalam Pariwisata

Perkembangan dunia yang tanpa batas dapat menimbukan dampak positif maupun dampak negatif. Dari setiap dampak yang ditimbulkan, dalam bidang sosial budaya tampak nyata berpengaruh dalam setiap aktivitas kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini dapat ditunjukan adanya perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin modern dan konsumtif, bahkan menggeser nilai-nilai lokal yang selama ini dipertahankan. Sikap yang harus ditunjukkan oleh

masyarakat Indonesia sebagai pengamalan dari Pancasila dalam menghadapi nilai-nilai gloBalisasi, terutama dalam kehidupan sosial budaya.

Perubahan sosial berikutnya bahwa pluralitas tidak terfokus hanya pada aspek SARA. Akan tetapi, di masa yang akan datang kemajemukan masyarakat Indonesia yang sangat heterogen ditandai dengan adanya sinergi dari peran, fungsi, dan profesionalisme individu atau kelompok. Sehingga, kontribusi profesi individu atau kelompok itulah yang akan mendapat tempat dimanapun mereka berprestasi.

Ini menunjukan bahwa filter Pancasila tidak berperan optimal, itu terjadi karena pengamalan Pancasila tidak sepenuhnya dilakukan oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, harus ada tindakan lanjut agar budaya bangsa Indonesia sesuai dengan Pancasila. Pembudayaan Pancasila tidak hanya pada kulit luar budaya misalnya hanya pada tingkat propaganda, pengenalan serta pemasyarakatan akan tetapi sampai pada tingkat kemampuan mental kejiwaan manusia yaitu sampai pada tingkat akal, rasa, dan kehendak manusia.

Hal di atas juga dilakukan oleh masyarakat desa terhadap setiap pendatang dari barbagai daerah dengan latar belakang agama yang berbeda-beda menjadi fondasi dari toleransi mereka. Penghargaan atau apresiasi terhadap nilai-nilai kemanusiaan atau hak asasi manusia, sebagaimana yang dikehendaki oleh para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah bersepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar rakyat Indonesai dalam hidup berbangsa dan bernegara. Hal tersebut dapat dilihat dengan nyata dalam kehiduan sehati-hari di tengah-tengah masyarakat desa.

Walaupun mayoritas penduduk desa beragama Islam, pendirian rumah Ibadah agama lain seperti Gereja dapat dilakukan dengan lancar dan tentu telah mendapatkan ijin lingkungan. Demikian juga seBaliknya, semangat jemaat gereja untuk turut bergaul dengan komunitas muslim dengan prinsip gotong royong, baik dalam melakuakan kegiatan-kegaiatan yang berupa tradisi keagamaan maupun berupa tradisi kemasyarakatan diwujudkan dengan nyata seperti menjadi kepanitiaaan bersama pada kegiatan tersebut tanpa mengorbankan keyakinan masing-masing (Wiwit, 2019).

Jarak antara dua rumah ibadah, dari dua agama yang berbeda yang sangat berdekatan, seperti antara Masjid Nurul Hikmah dan Gereja Pantekosta di dusun Randu Agung, yang hanya berjarak sekitar 20 meter membuktikan betapa nilai-nilai toleransi terhadap hak asasi manusia (HAM) untuk mendirikan tempat ibadah bagi para pemeluk agama masing-masing, dijunjung tinggi oleh masyarakat desa (Wiwit, 2019). Seperti Desa wisata kebangsaan sangatlah wajar dan tepat, karena nilai-nilai dari Pancasila benar-benar tercermin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dari masyarakat desa.

Beberapa faktor penting yang menjadi dasar dari toleransi antar pemeluk agama beragama di desa sangat kokoh antara lain: faktor kesejarahan yang mana perasaan senasibseperjuangan, dalam artian bahwa masing masing pemeluk agama merasa bahwa mereka merupakan sama-sama pendatang yang bermigrasi dalam kurun waktu yang bersamaan; kearifan para tokoh masyarakat dan tokoh agama dari masa ke masa; adanya beragam kegiatan public (*public events*) dimana mereka berbaur dan lebur dalam kegiatan tersebut seperti dalam upacara adat maupu kegiatan olah raga bersama; adanya beragam kesenian tradisional yang dipelihara dengan baik; pembinaan yang terus menerus terhadap masyarakat tentang pentingnya kerukunan antar pemeluk agama beragama, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh para tokoh agama sekitar; keadilan dalam mendapatkan kesempatan untuk berperan aktif dalam pemerintahan desa; kedewasaan masyarakat yang tidak suka memperuncing berbedaan keyakinan/agama; kerja sama kegiatan perekonomian dan melakukan kegiatan dalam rangka peningkatan perekonomian secara bersama-sama; adanya kegiatan anjang sana antar pemeluk agama beragama setelah peringatan hari raya keagamaan; dan pengertian yang mendalam dari masing-masing tokoh agama atau juru dakwah untuk tidak menyampaikan atau tidak menyebarkan ajaran agamanya kepada yang bukan pemeluk agamanya.

Faktor-faktor tersebut sampai saat ini terpelihara dengan baik di tengah-tengah masyarakat, sehingga toleransi dan kerukunan serta kebersamaan antar pemeluk agama beragama dapat terjaga. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai contoh atau model kehiduapn desa yang aman sentosa. Dengan masyarakat yang memiliki semangat tinggi untuk menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme. Keharmonisan dan toleransi yang terjadi di masyarakat desa dapat dijadikan potensi wisata yang dipublikasikan kepada masyarakat luas. Diharapkan melalui hal ini dapat dijadikan sebagai contoh nyata betapa harmonis, toleransi, dan rukun menjadikan masyarakat hidup aman dan sejahtera.

BAB V
DESA WISATA KEBANGSAAN PATOMAN

5.1 Desa Patoman

5.1.1. Sejarah Desa Patoman

Patoman berasal dari kata "Pertemuan" yang berarti tempat bertemunya orang-orang dari beberapa (tiga) etnis (suku) yaitu Suku Jawa, suku Madura berasal dari Pulau Madura dan suku Bali yang berasal dari pulau Bali dan masyarakat Banyuwangi yang memang penduduk asli Banyuwangi. Dengan berbagai latar belakang dan bertempatnya ketiga etnis itu bertemu di tempat ini yang kemudian disebut Desa Patoman.

Desa Patoman tidak dapat dilepaskan dari Sejarah Desa Blimbingsari, mengingat Desa Patoman dan Blimbingsari dulunya adalah satu Desa yaitu Desa Blimbingsari. Karena Desa Blimbingsari saat itu terlalu besar dan luas, yang berdampak tidak efektif, efisien, dan optimalnya pelayanan kepada masyarakat. Pada tahun 2002 Desa Blimbingsari dipecah menjadi dua bagian wilayah administratif yaitu Desa Blimbingsari dan Desa Patoman. Sejak saat itu, Desa Patoman terbentuk dan memiliki otoritas untuk mengelola pemerintahannya sendiri.

Desa Patoman merupakan salah satu desa yang ada di wilayah Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi. Desa Patoman merupakan pecahan dari Desa Blimbingsari pada tahun 1999. Pada awalnya Desa Patoman termasuk dalam wilayah Desa Blimbingsari Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. Kemudian pada tahun 1999 Desa Patoman lahir sebagai Desa Persiapan Patoman yang kemudian pada tahun 2002 Desa Patoman resmi menjadi Desa Definitif.

Dilihat dari letak geografis Desa Patoman yang berada di wilayah Timur Kabupaten Banyuwangi yang merupakan dataran dataran rendah dengan iklim basah. Dimana iklim basah pada Desa Patoman merupakan musim penghujan lebih panjang dari musim kering dengan curah hujan tahunan berkisar 2000-2000 mm. Jarak Desa Patoman dengan pemerintahan Kota Administratif Banyuwangi adalah 7 Km sedangkan jarak Desa Patoman dengan ibu kota Provinsi Jawa Timur adalah sejauh ±295 Km (Sumber: Monografi Desa Patoman, 2019).

5.1.2. Letak Geografis Desa Patoman

Desa Patoman merupakan adalah salah satu desa di Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi yang memiliki luas wilayah 334.8 Ha. Dari luas tersebut digunakan untuk persawahan sebanyak 30,7 ha atau 9,17 %, digunakan untuk perkebunan rakyat seluas 257.0 ha atau 76,76 %, digunakan

untuk tambak seluas 10.0 ha atau 2,99 %, dan yang digunakan untuk pemukiman mencapai 16,3 ha atau 4,87 %. Sedangkan sisanya yang mencapai 20,8 ha atau 6,21 % merupakan fasilitas umum seperti jalan, kuburan, lapangan, tempat ibadah, sekolah sungai, dan prasarana lainnya. Desa Patoman memiliki luas wilayah menurut penggunaan yaitu luas tanah sawah 30,00 Ha, luas tanah kering 255,80 Ha, luas tanah basah 20,00 Ha, luas tanah perkebunan 0,00 Ha, luas fasilitas umum 29,00, dan luas tanah hutan 0,00 Ha.

Desa Patoman memiliki 46 RT dan memiliki 6 RW, di dalam desa Patoman terdapat 4 dusun yaitu Dusun Blibis yang memiliki 10 RT dan 2 RW, dusun Patoman Timur yang memiliki 12 RT dan 1 RW, Dusun Patoman Tengah yang memiliki 7RT dan 1 RW, dan Dusun Patoman Barat yang memiliki 13 RT dan 2 RW. Secara administrasi Desa Patoman terletak di wilayah Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi.Adapun batas–batas wilayah Desa Patomanyaitu : Disebelah utara Desa Patoman dibatasi oleh Desa Blimbingsari. Sebelah selatan dibatasi oleh Desa Watukebo.Sebelah timur dibatasi oleh Selat Bali. Sedangkan sebelah barat dibatasi oleh Desa Watukebo.

(a)

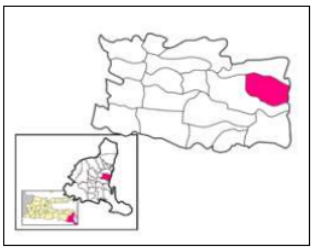

(b)

Gambar 4.1 (a) Kantor Desa Patoman (b) Peta Wilayah Admiminitratif Desa Patoman
(Sumber: Staff Desa Patoman)

Berdasarkan pembagian letak geografis adminitratif di Desa Patoman terdapat keberagaman suku. Patoman berasal dari kata “Pertemuan” yang berarti tempat bertemunya orang-orang dari beberapa (tiga) etnis (suku) yaitu Suku Jawa, suku Madura berasal dari Pulau Madura, dan suku Bali yang berasal dari Pulau Bali dan masyarakat Banyuwangi yang memang penduduk asli Banyuwangi. Dengan berbagai latar belakang dan alasan etnis itu datang dan bertemu di tempat ini yang kemudian disebut Desa Patoman.

Sebagian besar wilayah Desa Patoman merupakan kawasan lahan pantai dan didominasi lahan perkebunan yang jenis tanahnya adalah tanah liat yang sedikit berpasir. Faktor iklim seperti lokasi, letak geografis, curah hujan, dan jenis tanah

yang demikian sangat cocok untuk pertumbuhan tanaman kelapa sehingga sebagian besar masyarakat Desa Patoman selain bermata pencaharian sebagai petani juga sebagai pengrajin kelapa.

Pada awalnya Desa Patoman termasuk dalam wilayah Desa Blimbingsari Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. Kemudian pada tahun 1999 seiring dengan bergulirnya era reformasi dimana keterbukaan atau transparansi menjadikan segala sesuatu berubah dengan drastis. Hal ini terbukti dengan tahun 2002 Desa Patoman telah secara resmi menjadi Desa Definitif. Tujuan dari pemisahan diri dari Desa Blimbiungsari karena padatnya penduduk dan luas wilayah sehingga ketidakmampuan pemerataan hasil pembangunan dapat teratasi.

5.1.3 Prasarana Ibadah

Rumah ibadah merupakan suatu prasarna ibadah yang penting bagi pemeluk agama di suatu tempat. Selain sebagai tempat melaksanakan ibadah juga sebagai simbol keberadaan pemeluk agama. Di samping itu, dengan prasarana ibadah dipergunakan sebagai tempat untuk menyebarkan ajaran agama dan sebagai anjang menyambung silahturahmi antar pemeluk agama Islam. Desa Patoman juga telah memfasilitasi dalam pembuatan prasaran ibadah seperti pembangunan dan perijinan pendirian rumah ibadah.

Merujuk dari arti nama Desa Patoman yang merupakan pertemuan, tidak diragukan lagi ada berbagai pemeluk agama yang tinggal dan menetap disini. Berdasarkan dari data Desa Patoman memiliki beberapa agama yaitu Agama Islam sebanyak 4.065 jiwa, Agama Kristen sebanyak 2 jiwa, Agama Hindu sebanyak 816 jiwa, dan Agama Budha sebanyak 7 jiwa. Desa Patoman memiliki tiga suku yaitu Suku Jawa sebanyak 1.881 jiwa, suku Madura sebanyak 2.221 jiwa dan suku Bali sebanyak 816 jiwa.

Pemeluk agama di Desa Patoman terdapat 4 agama sesuai dengan uraian diatas, maka tidak diragukan kemBali bahwa prasarana ibadah juga bermacam rumah ibadah seperti masjid untuk pemeluk Agama Islam, Wihara untuk pemeluk Agama Budha, dan Pura untuk pemeluk Agama Hindu. Jumlah prasarana ibadah dapat dilihat pada tabel berikut 4.1.

Rumah Ibadah	**Jumlah (Buah)**
Masjid	3
Langgar/Surau/Mushola	16
Pura	2
Vihara	1

Sumber: Data Kantor Desa Patoman

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Desa Patoman memiliki tempat ibadah yaitu masjid sejumlah 3 buah, langgar/surau/ mushola sejumlah 16 buah, pura sejumlah 2 buah dan memiliki 1 wihara milik pribadi. Dengan pembangunan prasarana ibadah yang diperlukan oleh pemeluk agama menunjukkan tingginya toleransi dan kerukunan di Desa Patoman.

Dalam pembinaan pemeluk agama beragam prasarana ibadah sangat diperlukan. Pemanfaatan prasarana ibadah dapat dipergunakan untuk peningkatan religius masyarakat dalam mengamalkan, menghayati, dan melaksanakan ajaran agama yang dipeluknya serta berakhlak mulia. Karakter yang kuat merupakan sebuah fondasi untuk hidup bersama untuk hidup bersama dalam kedamian serta keamanan yang terbebas dari tindakan-tindakan tak bermoral maupun tindakan tercela. Berikut adalah gambar 4.2 prasarana ibadah di Desa Patoman.

(a)

(b)

Gambar 4.2 (a) Vihara (b) Pura (Sumber: Data Kantor Desa Patoman)
(Sumber : Arsip Desa Patoman 2015-2020)

Vihara yang terdapat pada gambar 4.2 merupakan Vihara pribadi. Hal terjadi karena pemeluk agama Budha sedikit dan 4.2 (b) merupakan pura sebagai tempat melaksanakan ibadah bagi pemeluk Agama Hindu. Kerukunan yang terjadi di Desa Patoman menjadikan jati diri sebagai Desa Kebangsaan

5.2 Toleransi Sebagai Wisata Kebangsaan

Kehidupan Sosial, Ekonomi dan Budaya di Desa Patoman adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Selain itu kehidupan sosial juga mempengaruhi kehidupan budaya. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Bali dimanapun keberadaanya baik secara individu maupun kelompok akan senantiasa hidup sebagaimana di daerah asalnya yaitu Bali . Bagi yang hidup secara berkelompok atau tinggal pada suatu kawasan tertentu di luar

Bali , akan senatiasa hidup dengan sistem yang telah melekat yang diwarisi oleh para leluhur. Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat kampung Bali sangat menarik untuk bisa dibahas karena masyarakat yang tinggal di Desa Patoman tersebut bisa hidup rukun dan berdampingan satu sama lain ditengah keberagaman yang ada.

Masyarakat sebagai kesatuan hidup manusia, berinteraksi menurut sistem adat istiadat yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama (Koentjaraningrat, 1990) dalam (Herwin Sutrisno, 2015). Masyarakat berpindah dari satu lingkungan budaya ke lingkungan budaya yang lain, akan mengalami suatu proses sosial budaya yang timbul akibat bertemunya unsur-unsur kebudayaan dari kelompok masyarakat tersebut dengan unsur-unsur kebudayan dari kelompok masyarakat yang berbeda. Sehingga, Kebudayaan memengaruhi segenap kehidupan sosial, sehingga sering dipandang sebagai cara hidup atau *way of life* yang harus dipelajari dan diharapkan ditaati secara bersama oleh para anggota masyarakat tertentu atau para anggota dari suatu kelompok tertentu.

Masyarakat kampung Bali mayoritas menggunakan bahasa daerahnya sendiri sebagai suatu kebiasaan apabila berinteraksi dengan sesama etnik Bali, namun apabila berinteraksi dengan lain etnik masyarakat kampung Bali mampu menyesuaikan bahasa yang digunakan seperti bahasa using, jawa, madura, bahasa indonesia. Hal ini dapat dilihat dari kerukunan pemeluk agama beragama yang menghargai perbedaan dan saling membutuhkan satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari. Ini merupakan fungsi dari *Adaptation* sekaligus bentuk akulturasi yang tercipta antara etnik Bali dan lainnya.

Masyarakat Bali di desa Patoman tengah dalam sistem kemasyarakatannya menggunakan sistem kasta, namun sistem kasta hanya digunakan dalam situasi formal dan tidak bersifat ketat seperti di Bali , contohnya dalam penggunaan sebuah nama. Terdapat empat kasta atau wangsa yaitu :

a. Kasta Brahmana, contohnya I De Bagus, I De Bagus
b. Kasta Ksatria, contohnya I Gusti, I Dewe
c. Kasta Waisya, ontohnya Nakan, Si
d. Kasta Sudra, contohnya Wayan, Made, Nyoman, Ketut.

Sistem kemasyarakatan ini hanyalah pembeda status sosial saja di bidang keahlian. Namun tetap menjadi pemersatu tanpa membedakan satu sama lain. Yang mana semua masyarakat Patoman tengah saling memberi, membantu dan mengayomi. Masyarakat Bali yang ada di Desa Patoman tengah juga mempunyai kearifan lokal dalam hubungannya menjaga lingkungan. Hal ini sesuai dengan ajaran *Tri Hita Karana*. Dimana manusia diharuskan untuk melestarikan hubungan yang harmoni antara manusia dengan pencipta, manusia dengan alam, serta manusia dengan sesama manusia. Selain itu kebersamaan yang ada di desa

Patoman tengah sangat tinggi. Masyarakat saling bahu-membahu ketika masyarakat mengadakan pembangunan.

Dengan adanya keberagaman yang ada di Desa Patoman tidak membuat masyarakatnya terpecah belah, melainkan saling merangkul, menghormati, membantu dan mengayomi satu sama lain tanpa memandang latar belakang agama, suku, adat dan budaya, karena manusia tidak mampu hidup sendiri sebagai makhluk sosial. Kehidupan sosial tidak dapat dilepaskan dari kebudayaan manusia itu sendiri.

Kebudayaan merupakan makna yang terjalin secara keseluruhan yang meliputi kepercayaan, pengetahuan, kesenian, keagamaan, adat istiadat dan moral serta kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan manusia sebagai anggota masyarakat. kebudayaan dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui proses komunikasi dan belajar agar generasi yang diwariskan memiliki karakter yang tangguh dalam menjalankan kehidupan. Masyarakat Hindu di Kampung Bali dalam kehidupan sehari-hari selalu berpedoman pada ajaran Agama Hindu warisan para leluhur di Bali terutama dalam pelaksanaan upacara ritual dalam hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan alam tetap berlandaskan pada ajaran Agama Hindu.

Kebudayaan yang ada dalam masyarakat Bali Patoman tengah yang kebanyakan lebih didasarkan pada Agama Hindu dapat dikatakan menjadi tolak ukur bagi mereka dalam hal sosialisasi mereka terhadap masyarakat. Kehidupan mereka pun kebanyakan berlandasrkan atas ajaran agama yang mereka anut karena mereka percaya dan menyakini bahwa setiap kegiatan manusia di dunia ini jika didasarkan atas niat dan hati yang bersih lewat pengajaran dari agama mereka maka akan terhindar dari dunia yang mereka anggap maya dimana kelak akan membuat mereka jatuh ke dalam dosa.

Mayoritas masyarakat yang menetap di Desa Patoman tengah atau kampung Bali menganut Agama Hindu. Masyarakat etnik Bali yang berada di Kampung Bali selalu menjalankan semua hari raya kegamaan dan semua tradisi yang sudah menjadi warisan nenek moyang. Kegiatan keagamaan dalam Agama Hindu sama persis dengan masyarakat Hindu di Bali. Upacara keagamaan dijalankan dengan cara sederhana dan mengedepankan rasa gotong royong dan kebersamaan tanpa menghilangkan unsur kesakralan ritual itu sendiri. Berikut beberapa hari raya suci keagamaan yang selalu diperingati oleh masyarakat Bali di kampung Bali antara lain:

1. Hari Raya Nyepi

Hari raya Nyepi merupakan hari raya pemeluk Agama Hindu yang dirayakan setiap tahun baru Saka. Nyepi asal dari kata sepi (sunyi, senyap). Seluruh pemeluk Agama Hindu di kampung Bali melakukan perenungan diri untuk kemBali menjadi manusia yang bersih, suci lahir dan batin. Oleh karena itu semua

aktivitas di kampung Bali ditiadakan. Berikut beberapa prosesi dalam hari raya Nyepi yang di rayakan oleh pemeluk Agama Hindu di kampung Bali :

a. Melasti

Sebelum merayakan hari raya Nyepi, masyarakat kampung Bali menjalani prosesi yang disebut dengan upacara Melasti. Tradisi ini dilaksanakan dua atau tiga hari sebelum Nyepi. Melasti artinya membuang atau memusnahkan. Prosesi ini dimulai dengan persiapan iring-iringan pemeluk agama serta berbagai benda yang digunakan untuk upacara ke tempat sumber air seperti ke laut. Selain untuk membersihkan diri, upacara Melasti juga menjadi pembersihan dan penyucian benda sakral milik tempat ibadah Hindu yang nantinya akan diarak mengelilingi desa guna menyucikan desa Patoman. aspek sosial yang didapat terhadap adanya Prosesi melasti ialah bentuk interaksi antara anggota masyarakat dimana satu sama lain saling gotong royong guna melancarkan ritual tersebut. Pada Pelaksanaan Tradisi Melasti juga terdapat aspek Budaya ialah secara tidak langsung masyarakat memperkenalnya Tradisi tersebut pada anak-anak sehingga berperan penting dalam melestarikan dan mempertahankan Tradisi melasti yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Gambar 5.1 Tradisi Melasti
(Sumber: Foto Ngurah Kadek Arista, Tahun 2020)

b. Mengarak Ogoh-ogoh

Salah satu persiapan menuju prosesi perayaan hari raya Nyepi adalah membuat Ogoh-ogoh. Seperti tampak di Dusun Patoman tengah Keamatan Blimbingsari kabupaten Banyuwangi. Pembuatan Ogoh- ogoh dibuat oleh anggota Perhimpunan Hindu Dharma Indonesia (Peradah). Dana untuk membuat ogoh-ogoh berasal dari iuran beberapa pemeluk Agama Hindu di Banjar Patoman tengah atau kampung Bali . Setelah ogoh-ogoh siap diarak, semua ogoh-ogoh dikumpulkan di Pura Puseh Desa untuk dimusnahkan dengan cara dibakar. Aspek sosial yang didapat pada Tradisi ini adalah Interaksi yang terjalin antara masyarakat dan Anggota Peradah demi

kelancaran Tradisi mengarak ogoh-ogoh. Aspek Budaya yang didapat ialah Budaya Gotong Royong masyarakat kampung Bali serta partisipasi masyarakat sekitarnya dengan ikut menyaksikkan pawai Ogoh-ogoh tersebut. Kehidupan sosial dan budaya akan selalu berhubungan dengan aspek kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi terlihat dalam bentuk Iuran dari masyarakat Bali sehingga dana yang terasa berat menjadi ringan.

Gambar 5.3 Mengarak Ogoh-Ogoh
(Sumber: Foto Ngurah Kadek Arista, tahun 2019)

c. Hari Raya Nyepi

Kegiatan Nyepi dilakukan selama 24 jam. Pada saat hari raya Nyepi para Pecalang dan Banser bahu-membahu mengamankan perayaan hari raya Nyepi. Kehidupan Sosial masyarakat Desa Patoman terlihat jelas saat masyarakat Bali mengadakan kegiatan atau hari raya keagamaan lainnya dengan saling kerja sama untuk mengawasi berjalannya kegiatan tersebut. Begitu juga seBaliknya Misalnya, pemeluk agama Islam sedang mengadakan Pengajian Akbar, terdapat beberapa pecalang dari pemeluk Agama Hindu Kampung Bali dan anggota Banser mengamankan Pengajian Akbar. Begitu juga seBaliknya, ketika pemeluk Agama Hindu Kampung Bali mengadakan hari raya Nyepi, pemeluk agama muslim melalui satgas Banser juga membantu pengamanan. Hal ini merupakan bentuk asimilasi masyarakat kampung Bali yang didorong oleh faktor simpati.

d. Upacara Hari Ngembak Geni

Upacara Hari Ngembak Geni berlangsung setelah hari raya Nyepi berakhir. Pada esok harinya dipergunakan melaksanakan Dharma Shanty, saling berkunjung dan saling memaafkan sehingga pemeluk Agama Hindu memulai tahun baru saka dengan hal baru yang positif. Baik dilingkungan masyarakat Kampung Bali maupun lingkungan sekitarnya. Sehingga terjalin kerukunan antar pemeluk agama beragama.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa makna Nyepi itu sendiri adalah manusia diajarkan untuk mawas diri, merenung sejenak dengan apa yang telah kita perbuat. Di masa lalu, saat ini dan merencanakan yang lebih baik dimasa yang akan datang dengan tidak lupa selalu bersyukur dengan apa yang telah diberikan oleh sang pencipta.

e. Galungan

Hari suci kegamaan yang dirayakan di Dusun Patoman tengah adalah Galungan. Galungan adalah hari suci dimana pemeluk Agama Hindu Bali merayakan kemenangan Dharma (kebaikan) melawan Adharma (keburukan). Pemeluk Agama Hindu khususnya di Patoman tengah biasanya ketika menyambut Hari raya Galungan memesang penjor pada hari Selasa Anggara Warawuku Dungulan (Penampahan Galungan). Penjor terbuat dari sebatang bambu yang ujungnya melengkung, dihiasi dengan janur yang muda serta daun lainnya (*plawa*). perlengkapan penjor Pala Bungkah (umbi-umbian), pala Gantung (kelapa, mentimun, jagung, padi), jajan, serta sanggah Ardha lengkap dengan sesajennya. Atapnya dibuat melengkung setengah lingkaran sehingga menyerupa bentuk bulan sabit.

Memasang penjor bertujuan sebagai ungkapan rasa terima kasih atas kemakmuran yang diberikan oleh Ida Sang Hyang Widhi (Tuhan). Pada saat hari raya Galungan pemeluk Agama Hindu melaksanakan persembahyangan dan dilanjutkan dengna Dharma Santi dan Saling mengunjungi sanak saudara atau tempat rekreasi. Kehidupan sosial masyarakat kampung Bali yang didapat pada saat hari raya Galungan ialah kerukunan masyarakat dalam pembuatan Penjor, kehidupan Budaya dari hari raya Galungan ini seperti mengajarkan para pemuda kampung Bali dalam pembuatan Penjor, sehingga pembuatan penjor tetap dilestarikan dimanapun keberadaan masyarakat Bali. Terdapat pula kehidupan ekonomi dimana masyarakat dalam pembuatan Penjor memproduksi sendiri sehingga Dana yang dikeluarkan tidak terlalu banyak. Pembuatan Penjor Ini tidak hanya diwariskan kepada orang tua saja melainkan kepada Generasi pemuda Kampung Bali.

Gambar 5.4 Pemuda Kampung Bali Melestarikan Pembuatan Penjor
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 14 September 2020)

f. Kuningan

Makna dari hari raya kuningan adalah diharapkan manusia mampu menyesuaikan diri dengan alam, dan taat dengan hukum alam dan diharapkan mampu menata kemBali kehidupan yang harmonis sesuai dengan tujuan Agama Hindu. Pada perayaan Kuningan ini memiliki keunikan dan ciri khas yakni isi sesajen atau persembahan pemeluk Agama Hindu adalah berupa nasi kuning, berbeda dengan pelaksanaan pada saat upacara lainnya seperti Galungan, Pager wesi, saraswati yang menngunakan sarana nasih putih. Selain itu persembahyangan dilakukan sampai jam 12.00 siang saja.

g. Saraswati

Saraswati dimaknai sebagai turunnya ilmu pengetahuan yang suci kepada pemeluk agama manusia untuk kemakmuran, kemajuan, perdamaian dan meningkatkan keberadaban pemeluk agama manusia. Hari Sarawaswati diperingati setiap enam bulan sekali, tepatnya pada hari saniscara umanis watugunung. tujuan dari diadakannya ritual hari sarawati adalah untuk memuja bersyukur kepada Tuhan yang dalam hal ini berfokus kepada Dewi Saraswati sebagai simbol vidya (ilmu pengetahuan) atas anugrah ilmu pengetahuan yang dikaruniakan kepada kita semua.

h. Pagerwesi

Makna dari hari raya Pagerwesi yang berarti pagar dari besi. Yang melambangkan suatu perlindungan yang kuat. Hari raya Pagerwesi sering diartikan oleh pemeluk Agama Hindu sebagai hari untuk memagari diri yang dalam bahasa Bali disebut magehang awak. Hari raya pagerwesi dilaksanakan setiap enam bulan sekali sesuai kalender saka. Persiapan dan pelaksanaan dengan khidmat, dimana pagi hari pemeluk Agama Hindu Bersembahyang di pura dan merajan keluarga masing-masing. memang terlihat berbagai budaya yang khas dengan kehidupan sosial masyarakat Bali yang unik. Aspek kehidupan sosial yang didapat ialah bentuk kerjasama masyarakat Bali dalam menyajikan tarian tanpa melihat status sosial. Hari raya Pagerwesi berlangsung di balai Gong Banjar Adat Patoman yang menjadi wahana penting dalam pelestarian seni dan budaya Bali . Balai Gong juga digunakan sebaik- baiknya menempa generasi muda di berbagai bidang seni, seni tari, seni tabuh (gamelan) dan seni ukir. Hal ini tercermin dalam kehidupan budaya masyarakat kampung Bali .

Gambar 5.5 Hari Raya Pagerwesi
(Sumber: foto Klian Adat Kampung Bali, Tahun 2019)

Selain beberapa hari raya keagaman masyarakat Bali di desa Patoman tengah, terdapat pula Pura atau Sanggah Pemrajan yang berguna sebagai tempat memuja Tuhan, Dewa, Para Leluhur, hingga Nenek Moyang dan tempat tersebut disebut dengan Pura. Di kampung Bali terdapat dua pura utama, namun juga tiap keluarga hampir memiliki sanggah pemrajan masing-masing. Di Kampung Bali terdapat dua Pura yang utama antara lain:

i. Pura Puseh Desa

Berdasarkan Narasumber Bapak Made Widodo, Pura Puseh Desa yang ada di Banjar Adat Patoman ini merupakan Pura tertua setelah Pura yang ada di Kampung Bali di kota Banyuwangi. Dengan hijrahnya perjalanan sejarah orang Bali yang bernama Buyut Druning pada tahun 1819 ke desa Patoman yang memberi sebidang tanah untuk dibuat pura sekitar abad ke 18. Pura Puseh desa ini untuk memuja Dewa Brahmana sebagai Dewa Pencipta dan Dewa Wisnu sebaga dewa Pemelihara.

j. Pura Dalem Banjar Adat Patoman

Pura Dalem Banjar Adat Patoman untuk memuja Dewa Siswa sebagai pelebur.

Gambar 5.7 Pura Dalem Banjar Adat Patoman
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 12 September 2020)

Dalam perayaan hari jadi Pura Banjar Adat Patoman terdapat Upacara Piodalan (hari jadi pura). Upacara Odalan merupakan sebuah upacara keagamaan Hindu Bali untuk memperingati hari kelahiran pura/tempat suci semacam perayaan ulang tahun kalau pada manusia, atau mengenang hari pertama kali orang suci membuat rumah yang sekaligus membuat mrajan/sanggah (tempat suci untuk pribadi). Odalan tahunan Pura Desa dirayakan lengkap dengan tarian sepanjang malam. Odalan berasal dari kata "Wedal" atau lahir. Biasanya, prosesi odalan atau hari besar tersebut dipimpin oleh orang suci seperti pemangku ataupun pendeta. Tujuan dari upacara ini adalah untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis dan sejahtera lahir batin di masyarakat.

Masyarakat Bali di desa Patoman tengah juga tidak dapat dilepaskan dari ritual Ngaben. Ngaben merupakan salah satu upacara *pitra yadnya*. Ngaben berasal dari kata *Beya* yang artinya bekal. Tindakan masyarakat Hindu di Kampung Bali yang melaksanakan aktivitas kebudayaan dalam bantuk upacara ngaben merupakan simbolis, dimana perilaku tersebut didasari adanya emosi keagamaan dan mendekatkan diri dengan leluhurnya dengan cara melaksanakan upacara Ngaben. Masyarakat Hindu di kampung Bali yang melaksanakan Ngaben dilaksankan dengan cara sederhana, tanpa adanya kemegahan yang disuguhkan. Namun, tidak membuat masyarakat Hindu di Kampung Bali menghilangkan nilai sakral yang terkandung dalam upacara Ngaben tersebut. Karena, dalam pelaksanaan Ngaben yang terpenting adalah doa dari keluarga yang dipanjatkan untuk roh para leluhur yang mendahului mereka guna keselamatan dan kedamaian roh tersebut. Upacara ngaben dimulai dengan arak-arakan dari para keluarga. Masing-masing keluarga membawa foto mendinga atau jasad yang akan diaben. Bunyi gamelan ikut mengiringi rombongan sampai ke lokasi Ngaben. Setelah jasad diaben atau dibakar, sisa abu dari pembakaran jasad dimasukkan ke dalam buah kelapa gading untuk kemudian dilarung ke laut atau sungai yang dianggap suci.

Dalan upacara Ngaben ini juga terdapat kehidupan sosial dan ekonomi yang saling berhubungan diantaranya ialah dengan diadakan upacara Ngaben massal diperuntukkan bagi keluarga yang kurang mampu, agar jasad para leluhurnya dapat disucikan atau dibersihkan sesuai dengan ajaran Agama Hindu. dengan adanya ngaben massal ini, keluarga yang kurang mampu dapat melaksanakan ritual tersebut dengan membayar 2,5 juta rupiah atau bahkan gratis jika memang benar-benar tidak mampu. Hal ini tercermin bahwa masyarakat kampung Bali sangat menjunjung tinggi nilai solidaritas dalam kehidupan sosial budaya. Aspek budaya yang dapat dilihat pada upacara ngaben kepedulian masyarakat terhadap warga yang tidak mampu

melaksanakan ritual ngaben karna kendala dari biaya maka dari itu kampung Bali mengadakan Ngaben massal. Sehingga tercermin masyarakat kampung Bali memiliki solidaritas tinggi dan peduli sesama.

Gambar 5.8 Upacara Ngaben di Kampung Bali
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 29 Agustus 2020)

Masyarakat kampung Bali juga memiliki kearifan lokal sendiri dalam melestarikan kesenian Bali . Kesenian merupakan salah satu dari tujuh unsur kebudayaan yang universal yang pada umumnya ditemukan dalam kehidupan masyarakat, yang dapat berupa istiadat, aktivitas sosial seni rupa, seni musik, seni gerak dan seni drama. Kesenian yang masih dilestarikan di Desa Patoman tengah adalah Seni Dhamarwulan atau janger Dharmayasa merupakan Drama Gong dari Bali yang berakulturasi dengan budaya Jawa dan Banyuwangi. Seni Dhamarwulan atau Janger Dharmayasa merupakan karya seni asli dari leluhur orang Bali di Desa Patoman tengah pada tahun 1921.

Janger adalah sebuah tarian asli Bali yang ditarikan oleh pasangan laki-laki dan perempuan lebih dari empat orang. Kesenianjanger memang melekat dengan keseharian masyarakat Patoman. karena di Desa Patoman Tengah terdapat satu grup janger yang melegenda yakni grup janger “Dharma Yasa”. Janger yang ada di Patoman ini memiliki ikatan historis yang kuat dengan tempat aslanya di Bali . Grup Janger Dharma yasa memiliki keunikan tersendiri yang memang menghidup-hidupi oleh orang-orang Bali sendiri yang tinggal di Kabupaten Banyuwangi.

Perpindahan orang-orang keturunan Singo Bali di Patoman itu, tidak hanya sekedar perpindahan fisik. Agama dan kebudayaan hingga keseniannya pun ikut terbawa. Tak terkecuali seni janger dan musik Gamelan pengiringnya. Kesenian itu, lambat laut menjadi Grup Dharma Yasa. Jika diperhatikan secara seksama, janger di Patoman tengah ini memiliki rasa tersendiri. Alunan musiknya hingga barong yang ditampilkannya. Semuanya memiliki kekhasan yang sulit diadaptasi oleh grup janger yang lain. Hal ini

semkain mengukuhkan seni legendaris dari Dharma Yasa. Dengan adanya kesenian Janger Dharmayasa ini sebagai bentuk dari upaya pelestarian budaya masyarakat Kampung Bali itu sendiri. Hal ini sesuai dengan skema AGIL yang membahas adanya sistem latensi/pemeliharaan pola.

Gambar 5.9 Pementasan Seni Janger Dharma Yasa Oleh Para Pemuda Kampung Bali
(Sumber: Foto Klian Adat Kampung Bali, Tahun 2019)

Dengan adanya pemeliharaan pola menjadikan kampung Bali memiliki identitas komunitas Etnik Bali. Identitas adalah suatu ciri yang melekat pada suatu kelompok yang memiliki kekhasan sendiri sehingga membedakanya dari etnik lain. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, diketahui bahwa identitas masyarakat kampung Bali masih berhubungan atau masih mengambil nilai-nilai kehidupan masyarakat etnik Bali sebagai bentuk warisan nenek moyang. Identitas yang masih murni dapat dilihat pada sistem kepercayaan dan sistem penamaan sebagai masyarakat Hindu Bali. Identitas standar terdapat pada kehidupan masyarakat pada bidang sistem pura, sistem kalender, pakaian dan dandanan, banjar, sesajian, pasraman, gotong royong, bahasa Bali, dan musik.

5.3 Masyarakat Multikultur di Desa Kebangsaan Patoman

Berdasarkan data-data yang telah di peroleh oleh peneliti, Desa Patoman merupakan desa yang terdapat masyarakat multikultural,karena pada masyarakat Desa Patoman terdapat keragaman, seperti ditinjau dari Agama terdapat agama Islam, Kristen, Hindu dan Budha. Terdapat suku yaitu Suku Jawa, Madura dan Bali.Lalu ditinjau dari segi Bahasa masyarakat Desa Patoman menggunakan bahasa Jawa,Madura dan Bali. Sedangkan untuk kebudayaan yaitu seperti budaya bersih desa, memperingati tujuh bulanan atau mitoni,selapanan, odalan, melasti, papar gigi. Untuk seni terdapat seni yang beragam jenis seperti janger, sanggar

tari, terbang kuntulan yang termasuk kelompok seni asli Banyuwangi. Lalu terdapat juga seperti orkes, kosidah itu termasuk seni nasional.

Gambar 5.10 Pemain Janger
(Sumber: Foto Klian Adat Kampung Bali, Tahun 2019)

Pada masyarakat Desa Patoman meskipun terdapat berbagai macam keberagaman, tetapi hubungan antar masyarakat tetap rukun. Pada saat-saat kegiatan yang melibatkan seluruh masyarakat Desa, mereka tidak selalu menghubungkan tentang dari mana latar belakang suku atau agama, semua berkumpul menjadi satu dan sama. Menjunjung tinggi sikap saling mengormati dan menghargai adalah suatu hal yang terbiasa masyarakat tanamkan dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu terdapatnya bahasa yang beragam juga masyarakat tidak terlalu mempermasalahkan. Apabila masyarakat dalam berkomunikasi sehari-hari menyesuaikan bahasa yang di pergunakan suku yang di ajak komunikasi, dan rata-rata 50% masyarakat Patoman bisa 3 bahasa yaitu jawa, Madura dan Bali, karena dari kecil sudah membaur dan dari situlah mereka belajar bahasa itu.

BAB VI
DESA KEBANGSAAN WATUKEBO

6.1 Profil Desa Watukebo

Sejarah Desa Watukebo Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi berawal alkisah dikala itu Pangeran Haryo Tjakraningrat di Krajaan Yogyakarta Hadininngrat mempunyai seorang putra yang bernama Raden Karto Asmoro. Dalam suatu hari ketika tidur siangnya Sang Raden Karto Asmoro bermimpi bertemu seorang gadis cantik yang bernamaMade Kuppe dari Negara Bali. Mimpi pertemuan itu akhirnya menjadi baying-banayang yang tak terlupakan dalam hari-hari kehidupan Raden Karto Asmoro, dan membuat hati gundah gulana ingin untuk memeliki gadis yang dimimpinya itu.

Hingga suatu saat Sang Ayah Pangeran Haryo Tjakraningrat merasa kasihan terhadap putranya, dan dipanggilah Sang Putra, maka disampaikanlah hal hal yang selama ini yang selalu merisaukan hati Raden Karto Asmoro atas mimpinya itu, selama ini ingin memiliki gadis impianya Made Kuppe dari Negara Bali. Akhirnya Sang Pangeran Haryo Tjakraningrat menyanggupi apa yang diinginkan oleh San Putra, yakni ingin melamar gadis pujaan hatinya, Made Kuppe dari Negara Bali. Sang Pangeran Haryo Tjakraningrat memerintahkan Senopatinya untuk dating ke Negara Bali untuk menemui Gusti Made Djelantik ayahanda Made Kuppe, dengan maksud kedatangannya adalah ingin meminang Putrinya yaitu Made Kuppe untuk dijadikan istri raden Karto Asmoro.

Kedatangan Senopati akhirnya diterima oleh Gusti Made Djelantik dan keinginan Raden Karto Asmoro langsung disampaiakn kepada putrinya yaitu Made Kuppe. Setelah berbincang-bincang cukup lama akhirnya Sang Putri Made Kuppe menyanggupi perminintaan Raden Karto asmoro untuk dijadikan istrinya tapi dengan memenuhi syarat, yaitu harus membawa Kebo Landu sebanyak 44 Ekor.Singkat cerita persyaratan itu diterima dan dibawalah pesan itu oleh Senopati untuk disamapaikan kepada Sang Pangeran Haryo Takraningrat. Untuk menyanggupi permintaan putranya (Raden Karto Asmoro), maka Pangeran Haryo Tjakraningrat memerintahkan para Senoipati untuk mencari Kebo Landu sebanyak 44 ekor dan segera untuk disampaikan kepada Sang PangeranGusti Made Djelantik sebagaiman persyaratan untuk memeinang putrinya (Made Kuppe).

Di tengah perjalanan dalam rangka menghantarkan Kebo Landu sebagai Hantaran pinangan, Disaat perjalanan yang cukup panjang itu para senopati mengalami kelelahan, akhirnya para Senopati dan beberapa Kebo Landu berhenti sejenak untuk melepas lelah sambil melentangkan badan hingga sampai tertidurlah para Senopati bersama-sama Kebo Landu. Setelah tertidur cukup lama,

para senopati terbangun dan terkejut, lalu membangunkan teman-teman senopati untuk melanjutkan perjalanannya ke Negara Bali, kemudian mendatangi beberapa Kebo Landu untuk disiapkan berangkat ke Negara Bali. Dari jumlah 44 ekor Kebo Landu tersebut tinggal satu ekor Kebo Landu yang tertidur lelap dan sangat sulit untuk dibangunkan.

Setelah berulangkali sang senopati berusaha untuk membangunkan tetapi hasilnya nihil dan Kebo landu itu tetap tidak mau bangun. Dalam kekesalan dan kelelahanya dalam membangunkan Kebo Landu yang satu itu lalu Sang Senopati Bertuah dengan sangat marah (*Hai Kebo Landu kue iku yen turu oro keno ditangekno, kue iku koyo Watu*) dan saat itulah juga Kebo Landu yang satu ini menjadi Batu dan mirip bentuk kerbau. Untuk mengenang peristiwa ini salah satu, ketua Para Senopati menyampaikan kalimat "Seandainya nanti jaman telah berkembang maka tempat ini *Namailah Deso utowo Kuto Watukebo*, *WATU* artinya Batu dan *KEBO* artinya Kerbau dan jadilah NAMA Watukebo. Semua ini akibat Kebo Landu yang terkutuk menjadi Batu, akhirnya sampai saat ini disebutlah DESA Watukebo. Desa Watukebo merupakan desa adminitratif dari Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi.

Gambar 6.1 Monumen Watukebo
(Sumber: Sumber Pribadi, 2020)

6.1.1 Letak Geografis Desa Watukebo

Desa Watukebo termasuk wilayah Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi yang terbentuk pada tahun 1930. Desa Watukebo termasuk desa yang terletak disebelah paling timur dari Pulau Jawa, dimana sebelah timurnya dari desa Patoman adalah selat Bali di sebelah utara desa Watukebo dibatasi oleh Desa Karangbendo dan Desa Blimbingsari, di sebelah selatan dibatasi oleh Desa Bomo dan Desa Gintangan, Sedangkan di sebelah barat dibatasi oleh Desa Kaotan dan Rogojampi. Luas wilayah Desa Watukebo adalah 1132 Ha, dari luas tersebut di pergunakan untuk persawahan sebanyak 494 ha, Ladang Tefal 453 ha, Perumahan 32 ha, kuburan 5 ha, tambak 41,2 ha, dan lain-lain 96,8 ha. Adapun jarak orbitasi (jarak dari pusat pemerintahan):

1) Jarak dari kantor desa ke kecamatan 4 Km
2) Jarak dari kantor desa ke kabupaten 9 Km
3) Jarak dari kantor desa ke provinsi 300 Km

Gambar 6.2 Kantor Desa Watukebo dan Peta Administratif Desa Watukebo
(Sumber: Data Kantor Desa Watukebo, 2020)

6.1.2 Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Watukebo

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka di Desa Watukebo telah terbentuk Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan Pemerintahan Desa Watukebo. Jumlah penduduk Desa Patoman Kecamatan Blimbingsari sejumlah 11.866 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 4.607 KK.

Desa Watukebo memiliki beberapa agama yaitu Islam sejumlah 10.967 Jiwa, Hindu sejumlah 911 Jiwa, Kristen sejumlah 6 Jiwa. Desa Watukebo memiliki tempat ibadah yaitu, Masjid sejumlah 9 buah, Mushollah sejumlah 76 buah, Pura sejumlah 2 buah, dan Kristen melakukan ibadah di desa lain.

(a) (b)

Gambar 6.3 (a) Masjid Gelondong (b) Pura Amerthasari di Desa Watukebo
(Sumber: Foto Pribadi, 2020)

6.2 Masyarakat Multikultur di Desa Kebangsaan Watukebo

Berdasarkan pengamatan dan data yang di peroleh peneliti masyarakat Desa Patoman terdapat masyarakat multikultur karena terdapat beragam agama, seperti agama Islam, Kristen, Hindu. Dan terdapat beberapa suku yaitu Suku Osing di Dusun Krajan Dan Dusun Gepuro, Suku Jawa di Dusun Glondong dan Gumuk Agung, suku Bali di dusun amerthasari dan sedangkan di dusun Patoman terbagi 3 suku, 10% Suku Bali, 30% Suku Jawa dan 60% Suku Osing. Ditinjau dari segi bahasa masyarakat Desa Patoman menggunakan bahasa Jawa, Osing, dan Bali. Sedangkan untuk kebudayaan yaitu seperti budaya bersih desa, memperingati tujuh bulanan atau *mitoni, selapanan, odalan, melasti, papar gigi*. Untuk seni terdapat seni yang beragam jenis seperti Janger, Mocoan campur sari, Drum band, Group lawak memet, hadrah dan jaranan.

(a)

(b)

Gambar 6.4 (a) Jaranan, (b) Lawakan

Pada masyarakat Desa Watukebo meskipun terdapat berbagai macam keberagaman, tetapi hubungan antar masyarakat tetap rukun. Pada saat-saat kegiatan yang melibatkan seluruh masyarakat Desa, mereka tidak selalu menghubungkan tentang dari mana latar belakang suku atau agama, semua berkumpul menjadi satu dan sama. Menjunjung tinggi toleransi, sikap saling mengormati dan menghargai satu sama lain adalah suatu hal yang terbiasa masyarakat tanamkan dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu terdapatnya bahasa yang beragam juga masyarakat tidak terlalu mempermasalahkan. Apabila masyarakat dalam berkomunikasi dengan suku lain Menggunakan bahasa Jawa dan Osing.

6.2.1 Pola Interaksi dan Hubungan kemasyarakatan

Dalam melakukan interaksi sehari-hari masyarakat Desa Patoman dan Desa Watukebo terjalin sangat baik dalam bentuk sosial maupun lainnya, sama halnya yang di sampaikan oleh "*Made utomo selaku peradah* atau pemuda adat suku Bali menyampaikan bahwa pola interaksi terjalin sangat baik dan saya mas dari kecil lebih banyak bermain dengan Suku Jawa atau Agama Islam. Bahkan di

bulan suci Ramadhan biasanya saya ikut patrol bangunin orang sahur selama 1 bulan penuh dan ikut takbir keliling".

6.2.2 Masyarakat Multikultur di Desa Patoman dan Desa Watukebo

Desa Patoman memiliki keberagaman serta memiliki masyarakat yang terdapat beragam agama, beragam suku, dan beragam bahasa. Di lihat dari prespektif agama yaitu terdapat agama Islam, Hindu, Budha dan Kristen. Sedangkan, dilihat dari suku yaitu terdapat Suku Madura, Suku Jawa, dan Suku Bali. Dalam berkomunikasi sehari-hari masyarakat menggunakan bahasa Jawa, bahasa Bali, bahasa Madura dan bahasa Indonesia. Dari hasil penelitian yang dilakukan kehidupan masyarakat multikultural dalam mempertahankan Pancasila sila ke 3 (Persatuan Indonesi) di Desa Patoman Kecamatan Blimbingsari memang sudah terjalin dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh adanya keberagaman agama dan keberagaman suku. Mereka hidup berdampingan sangat aman dan damai dalam melakukan kegiatan aktifitas sehari-hari.

Desa Watukebo tidak jauh berbeda dengan Desa Patoman memiliki keberagaman serta memiliki masyarakat yang terdapat beragam agama pula, beragam suku, dan beragam bahasa. Dilihat dari prespektif agama yaitu terdapat Agama Islam, Hindu, dan Kristen. Sedangkan, dilihat dari suku yaitu terdapat Suku Osing, Suku Jawa, dan suku Bali. Dalam berkomunikasi sehari-hari masyarakat menggunakan bahasa Jawa, bahasa Bali, bahasa Osing, dan bahasa Indonesia. Namun, Desa Watukebo yang terjalin kehidupan multikultur hanya beberapa dusun saja yaitu Dusun Patoman, Dusun Glondong, Dan Dusun Amenthasari. Sedangkan, untuk Dusun Krajan, Dusun Gepuro, dan Gumuk Agung tidak bisa dikatakan masyarakat multikultur karena jaraknya yang berjauhan. Dari hasil penelitian yang dilakukan kehidupan masyarakat multikultural sebagai implementasi Pancasila sila ke 3 memang sudah terjalin dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh adanya keberagaman agama dan keberagaman suku. Mereka hidup berdampingan sangat aman dan damai dalam melakukan kegiatan aktifitas sehari-hari.

Menurut Kepala Desa Patoman menyampaikan bahwa sampai saat ini masyarakat Desa Patoman dalam keadaan kondusif. Desa Patoman memang terdapat masyarakat yang beraneka macama suku dan agama yang berbeda–beda.Namun kehidupan sehari-hari masyarakat tetap hidup rukun dan saling menghargai. Dalam masyarakat melakukan kegiatan bersama tidak selalu menghubungkan tentang suku dan agama masing–masing. Pada dasarnya semua sama dan memiliki tujuan yang sama hanya caranya yang berbeda. Masyarakat Desa Patoman juga menjunjung tinggi nilai toleransi dan gotong-royong.

Gotong-royong ditunjukkan ketika ada memperbaiki saran publik, hajatan, atau perayaan hari bahagia atau pernikahan, khitanan, dan pemakaman. Toleransi

ditunjukkan pada saat menjelang bulan puasa seluruh kepala dusun, dan tokoh agama dikumpulkan dan diberikan informasi bahwsannya akan tiba bulan puasa dan nantinya supaya disampaikan kepada warganya yang beragama non Islam untuk menghormati. masyarakat di Desa Patoman mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan juga nelayan.

Untuk pelayanan di kantor desa juga sudah menerapkan program *Smart Kampung* jadi warga tetap bisa terlayani dan mendapatkan tanda tangan meskipun Kepala Desa tidak ada di kantor, akses *wifi* terbuka yanga ada di kantor desa juga dapat digunakan oleh seluruh masyarakat Desa Patoman. Adapun wujud kebudayaan yang masih ada di Desa Patoman seperti budaya bersih desa dan untuk keseniannya ada janger, terbang kuntulan, dan gamelan. Menanamkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu juga merupakan hal yang diterapkan dalam rangka mempertahankan Pancasila sila ke 3 (Persatuan Indonesia) di desa ini.

Sama halnya yang disampaikan oleh kepala Desa Watukebo yang menyatakan "selama ini hidup rukun dan saling berdampingan antara agama satu dengan yang lain. Meskipun berbeda bahasa dan berbeda kebiasaan, hal tersebut tidak terlalu dipermasalahkan dan tetap menjunjung tinggi gotong royong, saling membantu, saling menghormati, dan menghargai. Dan rencana saya ketika ada maulid nabi yang ada di dusun glondong itukan ada *jodang* mau saya ikut sertakan untuk mengiringi *pawai jodong* itu dengan musik khas Bali yaitu *cenceng* atau *bleganjuran*."

Sejauh ini masih belum ada konflik-konflik sosial yang dapat memecah belah masyarakat yang ada di sini. Kalaupun itu ada permasalahan diselesaikan secara musyawarah. Dari penelitian Kepala Desa Patoman dan Kepala Desa Watukebo, beliau berpendapat bahwa Pancasila sila ke 3 yaitu persatuaan Indonesia, artinya masyarakat Desa Patoman dan Desa Watukebo tetap menjunjung tinggi nilai toleransi, gotong-royong, saling membantu, saling menghormati dan saling menghargai dan juga kepedulian sosial. Dan beliau selaku kepala desa selalu memberikan arahan kepada masyarakat untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan, mengingat desa ini merupakan desa yang terdapat masyarakat multikultur maka semua masyarakat terus mempertahankan persatuan ini.

6.2.3 Penerapan Pancasila sila ke 3

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh desa dalam rangka penerapa panca sila ke 3 di Desa Patoman dan Desa Watukebo masih terus dilakukan sampai saat ini. Adapun bentu-bentuk kegiatan yang ada sesuai dengan hasil penelitian:

a. Pertemuan Lintas Agama

Pertemuan lintas agama dilakukan setiap setahun sekali bahkan setiap akan ada kegiatan atau memperingati hari besar keagamaan. Pertemuan ini melibatkan seluruh tokoh agama seperti ustad-ustad, lalu tokoh Agama Hindu, tokoh agama budha dan tokoh agama Kristen. Adapun yang sering dibahas dalam pertemuan-pertemuan lintas agama yaitu seperti apakah dalam saat ini situasi kerukunan antar pemeluk agama beragama maupun antar suku dalam keadaan baik-baik saja atau dalam situasi yang kurang baik. Selain itu juga menyampaikan bahwa akan ada hari besar keagamaan seperti nyepi, puasa ramadhan, hari raya idul fitri, hari raya idul adha.Hal ini disampaikan agar nantinya tidak dapat menimbulkan kesalahpahaman.

b. Kegiatan Bersih Desa

Kegiatan bersih Desa adalah acara yang masih ditetap dilaksanakan di Desa Patoman dan Desa Watukebo. Acara ini merupakan acara selamatan sekaligus doa bersama dengan masyarakat Desa Patoman agar tetap aman dan damai. Dalam acara bersih Desa ini, desa mengundang seluruh masyarakat desa. Dalam acara ini masyarakat dikumpulkan jadi satu, artinya pemeluk agama Islam dijadikan satu di satu blok atau wilayah, pemeluk Agama Hindu kumpulkan jadi satu blok atau wilayah, pemeluk agama Budha dijadikan satu dalam satu blok atau wilayah dan pemeluk agama Kristen dijadikan satu blok dengan pemeluk agama Kristen. Pada saat berdoa semua berdoa manurut agama dan kepercayaan masing-masing, namun saat berdo'a dilakukan secara bergantian. Sedangkan, untuk Desa Patoman dikoordinir oleh kepala dusun dan biasanya dilaksanakan di tiap balai dusun tertentu.

Gambar 6.5 Kegiatan Besih Desa yang Dilakukan Bersama-Sama dengan Semua Keyakinan

6.2.4 Memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia

Dalam kegiatan ini selain meningkatkan jiwa patriotisme masyarakat Desa Patoman dan Desa Watukebo untuk tetap mempererat tali persaudaraan dan saling toleransi antar suku maupun antar pemeluk agama beragama, namun HUT tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya karena wabah Covid-19 masyarakat Desa

Patoman mapun Desa Patoman hanya dengan doa bersama dengan di kordinir oleh tiap-tiap RT.

Gambar 6.6 Kegiatan peringatan HUT RI Bersama-sama tanpa memandang perbedaan

6.2.5 Kegiatan Keagamaan

a. Pemeluk Agama Islam : Idul Fitri, Idul Adha, Istighosah, Pengajian, Santunan Anak Yatim, Maulid Nabi
b. Pemeluk Agama Hindu : Odalan, nyepi, saraswati, kuningan dan galungan.
c. Pemeluk Agama Kristen : Natal, paskah, tahun baru.
d. Pemeluk Agama Budha : Waisak

.

Gambar 6.7 Kegiatan Keagamaan Oleh Salah Satu Agama Dan Dibantu Oleh Pemeluk Agama Lain

Pada gambar 6.11 menunjukkan suatu aktivitas pengajian yang dilakukan oleh pemeluk Agama Islam secara massal. Disan terlihat Pecalang yang merupakan bagian dari Pemeluk Agama Hindu ikut serta dalam membantu proses berlangsungnya pengajian massal. Hal ini menunjukkan sutau toleransi antar agama dan saling membantu. Dalam hal ini pecalang membantu dalam keamanan yang terlihat juga pada kegiatan santunan. Berikut juga terlihat kegiatan agama yang dilakukan oleh pemeluk agama Agama Hindu berupa *ngaben* (a) dan *ngarak Ogoh-ogoh* (b) serta *Acara Jodang Maulid Nabi* (c) seperti terlihat pada Gambar 6.12.

(a) (b)

(c)

Gambar 6.12 (a) Ngarak Ogoh-Ogoh (b) Upacara Adat Ngaben (c) Jodang Maulid Nabi

Dalam kegiatan keagamaan yang dilakukan sering kali pemeluk agama yang melakukan kegiatan juga melibatkan pemeluk agama yang lainnya, seperti misalkan saat pengajian akbar juga melibatkan seluruh pemeluk agama agama lain untuk membantu mengamankan agar acara tersebut berjalan lancar, begitupun ketika pemeluk Agama Hindu melaksanakan kegiatan keagamaan seperti nyepi, maka pemeluk agama lain juga ikut membantu mengamankan kegiataan tersebut, dan begitu seterusnya. Memang pada agama Kristen, Gereja tidak berada di Desa Patoman akan tetapi masih menjadi satu di tempat lain, namun itu tidak menjadi masalah bagi pemeluk agama Kristen.

Seluruh agama memiliki hari raya besar masing-masing, seperti agama Islam hari raya Idul Fitri dan Idul Adha; Agama Kristen Hari Raya Natal dan Tahun Baru; pemeluk Agama Hindu adalah Hari Raya Nyepi, Galungan dan Kuningan; Agama Budha adalah Hari Raya Waisak. Di dalam penelitian kepada seluruh tokoh agama, yang dilakukan ketika salah satu agama merayakan hari rayanya, pemeluk agama yang lain juga tetap rukun dan saling menghormati. Bahkan pemeluk agama lain melakukan silahturahmi atau mengucapkan selamat merayakan hari raya kepada pemeluk agama yang merayakan baik secara langsung maupun melalui media sosial.

6.2.6 Tahun Baru Masehi

Tahun Baru Masehi adalah sutau perayaan untuk mempoeringati berakhirnya satu tahun dan menandai dimulai hitungan tahun selanjutnya. Masyarakat Desa Patoman dan Desa Watukebo juga ada kegiatan tahun baru masehi yang terselenggara di tiap tahunnya. Hal itu di laksanakan meski hanya sebatas bakar ikan dan lalu di makan bersama juga selalu melibatkan warga dan pemuda dari berbagai suku maupun agama.

6.2.7 Kepedulian sosial

Dalam kehidupan bermasyarakat sikap kepedulian sosial juga ditanamkan dalam rangka mempertahankan Pancasila sila ke 3(Persatuan Indonesia). Seperti kegiatan yang tampak pada masyarakat Desa Patoman dan Desa Watukebo yaitu santunan anak yatim, bantuan pada kaum dhuafa, dan pada saat ada warga yang tertimpa musibah. Sebagai contoh ada salah satu warga yang meninggal dunia. Hal itu dilakukan bukan hanya pada sesama pemeluk agama bahkan pada agama yang lain. Selain itu masyarakat juga masih hidup bersosial dengan baik seperti anjangsana pada saat hari raya, bercengkraman, atau hanya sekedar bertegur sapa.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Mustaqim. 2010. Epistemologi Tafsir Kontemporer. Yogyakarta: LkiS Yogyakarta

Adian Husaini. 2015. Kerukunan Beragama dan Kontroversi Penggunaan Kata Allah Dalam Agama Kristen. Jakarta : Gema Insani.

Aliman dan, dan Wantanas. 2018. Modul Utama Pembinaan Bela Negara, Modul 1 : Konsepsi Bela Negara dan Modul 2 : Implementasi Bela Negara. Jakarta : Dewan Ketahanan Nasional RI.

Adipitoyo, Sugeng, *dkk*. 1999. Morfofonemik Bahasa Jawa Dialek Surabaya. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

Alim Sumarno.2012.Penelitian Kausalitas Komparatif. Surabaya: elearning unesa.

A'la, abd. 2008. "Kebebasan narkis", Kompas 3 juni.

Basseng. Sammy Ferrijana. Triatmojo Sejati. 2019. Wawasan Kebangsaan Dan Nilai-Nilai Bela Negara. Jakarta. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia

Cassanova, J. 2008. Public Religions In The Modern World. Chicago: Chicago University Press,

Christoper, Daniel L.Smith (editor). 2005. Lebih Tajam dari Pedang-Refleksi Agama-agama Tentang Paradoks Kekerasan, Yogyakarta : Kansius.

Choi, H.S., & E.Sirakaya. 2005. Measuring Residents' Attitude toward Sustainable Tourism: Development of Sustainable Tourism Attitude Scale. Journal of Travel Research, 43, 380-394. Kemenpar.go.id

Dibyorini, MC.Candra Rusmala. 2005. "Solidaritas Sosial dalam kemajemukan Masyarakat Indonesia", Artikel dalam jurnal Ilmu Sosial Alternatif, Volume VI, Nomor 12, Desember 2005, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

Eliade, Mircea. The Sacred and The Profan.New York, 1959.

Elmen, Paul. 2012. The Restoration of Meaning to Contemporary Life. New York: Garden City.

Flood, Gavin. 2013.Beyond Phenomenology: Rethinking The Study of Religion. London: Bloomsbury Academic.

Hans Kohn. 1955. Nationalism Its Meaning and History. New York : D.Van Nostrand Company, Inc.

Hanifah, Abu. 2007. Toleransi Dalam Masyarakat Plural Memperkuat Pertahanan Sosial. Soekanto, Soerjono. 1982. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: CV. Rajawali.

Halim, Abdul. 2008. "Menggali Oase Toleransi", Kompas 14 April.Hasyim, Syafiq. 2007. "Idul Fitri, Memahami Hikmah Berbeda". Kompas 20 Oktober. Hernowo, M. 2008. "Kemajemukan Agama Bisa Menjadi Potensi", Kompas 9 Februari. Intan, Benyamin F. 2007. "Solidaritas Intelektual", Kompas 21 September.

Halil Tahir, Ijtihad Maqasidi. 2015. Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksitas Maslahah.Yogyakarta: LkiS

Hidayat, Komaruddin. 2003.Menafsirkan KehendakTuhan. Bandung: Mizan,.

Kaelan. 2013. Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya, Yogyakarta: Paradigma

Kinloch, Graham C. 2005.Sociological Theory: Development and Major Paradigm. Bandung: Pustaka Setia,.

Khoiri, Ilham. 2007. "Mimpi Indah Merajut Kebangsaan", Kompas 16 Agustus. Kompas. 2008. "Antitoleransi Yang Menguat Harus Segera Dihilangkan", 31 Maret Misrawi, Zuhairi. 2008. "Toleransi Sebagai Kuasa Nilai", Kompas 24 Mei.

Kumawi Basyir dkk. 2013. Pancasila Dan Kewarganegaraan. Surabaya: Sunan Ampel Press,

LAN RI. 2014. Modul Prajab : Sistem Administrasi Negara Republik Indonesian (SANKRI). Jakarta : Lembaga Administrasi Negara.

Oetjo Usman dan Alfian. 1991. Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara. Jakarta : Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP-7) Pusat.

Subkhan, Imam. 2007. Hiruk Pikuk Wacana Pluralisme di Yogya, Yogyakarta : Kansius. Sujatmiko, Iwan Gardono. 2008. "Makna Satu Abad Budi Utomo", Kompas 16 Mei.

Suseno, Frans Magnis. 2008. "Junjung Tinggi Pluralitas": Pengerasan Identitas Kelompok Akan Membunuh Diri Sendiri, Kompas 12 Mei.

Suhady, Idup dan A. M. Sinaga. 2006. Wawasan Kebangsaan dalam kerangka NKRI. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara – Republik Indonesia.

Sztomka, Piotr. 2007. Sosiologi Perubahan Sosial, Dialihbasakan oleh Diedit oleh Tri Wibowo Budi Santoso, Jakarta: Prenada

Scheyvens, R. 2003. Ecotourism and the empowerment of lokal communities. Tourism Management, 20(2), 245-249.

Sugiyono.2012. Metode Penelitian Bisnis. Bandung : Alfabeta.

Tosun, C. 2000. Limits to community participation in the tourism development process in developing countries. Tourism Management, 21, 613-633. https://www.bps.go.id.Hari selasa, tanggal 4 April 2018. Waktu 21.60 WIB

Wahyudi, M.Zaid. 2008. "Jadikan Toleransi Sebagai Modal", Kompas 17 Mei.

Wiwit Windiardani. Dhalia Soetopo. Agus Mursidi. 2019. Studi Deskriptif tentang Pengembangan Desa Kebangsaan Sebagai Desa Wisata di Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo. JPPKnVol 4, No.1, Juni 2019

Widjaja, HAW. 2003. Otonomi Desa. Jakarta : PT Raja Garafindo.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 Jo. Undang-Undang Nomor 6Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, danLambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2016

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara.

Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019.

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara.

PROFIL PENULIS

Dr. Agus Mursidi, M.Pd lahir di Banyuwangi 10 Agustus 1978. S1 lulus tahun 2007 di IKIP PGRI Banyuwangi dan tahun 2010 Lulus S2 Pendidikan sejarah dari Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) serta S3 Kajian Budaya Universitas Udayana tahun 2020. Penulisan buku yang pernah dilakukan adalah Toponimi kecamatan Se Kabupaten Banyuwangi tahun 2018. Buku desa kebangsaan di kecamatan Blimbingsari Tahun 2020. Buku dialektika bahasa jawa dalam tradisi perang bangkat suku osing kabupaten Banyuwangi. tahun 2020

Bayu Indra Permana, S.Pd, M.Pd lahir di Banyuwangi 23 Mei 1991, Studi Sarjana ditempuh di Universitas Negeri Malang pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Program Magister ia tempuh di Universitas Negeri Malang Program Studi Manajemen Pendidikan. Karir dalam dunia pendidikan ia mulai dengan mengajar sebagai guru PPKn di SMAN 2 Malang dan SMA Muhammadiyah 2 Genteng. Menjadi

Dosen pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Universitas PGRI Banyuwangi sejak Tahun 2015 sampai sekarang.

SINOPSIS

Desa Patoman adalah sebuah nama desa di Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Desa Patoman merupakan desa dengan masyarakat multikultural. Identik dari masyarakat di Desa Patoman adalah toleransi dan kerukunan yang tinggi dengan Suku yang berbeda yaitu Suku Madura, Suku Jawa, Suku Bali, dan Suku Osing. Keunikan lain dari Desa Patoman adalah jarak rumah ibadah yang berdekatan. Rumah ibadah yang terdapat di Desa Patoman adalah Masjid untuk pemeluk agama Islam, Vihara untuk pemeluk agama Budha, Pura untuk pemeluk agama Hindu, dan Gereja untuk pemeluk agama Kristen.

Kerukunan dan toleransi terlihat ketika perayaan Hari Besar pada masing masing agama. Sebagai contoh pengajian akbar yang dilaksanakan agama Islam, pecalang dari agama Hindu ikut membantu dalam keamanan dan kelancaran pengajian tersebut. Ketika pemeluk agama Hindu melaksanakan Nyepi, pemeluk agama lain berdatangan ke rumah pemeluk agama Hindu untuk berkunjung dan mengucapkan perayaan tersebut.

Persatuan Indonesia telah diterapkan di Desa Patoman. Dengan keunikan tersebut, Desa Patoman dapat dijadikan sebagai contoh nyata penerapan Sila Ke 3. Untuk itu, melalui desa wisata, Desa Patoman dapat dijadikan sebagai Desa Kebangsaan.

Buku ini dapat digunakan sebagai buku bacaan untuk sedikit mengenal multikultur dan budaya yang bisa sebagai referensi wisata yang menarik di Banyuwangi

Desa Kebangsaan

ORIGINALITY REPORT

30%	29%	7%	7%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

3%

★ Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Student Paper

Exclude quotes	Off	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	Off		

Desa Kebangsaan

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22

PAGE 23

PAGE 24

PAGE 25

PAGE 26

PAGE 27

PAGE 28

PAGE 29

PAGE 30

PAGE 31

PAGE 32

PAGE 33

PAGE 34

PAGE 35

PAGE 36

PAGE 37

PAGE 38

PAGE 39

PAGE 40

PAGE 41

PAGE 42

PAGE 43

PAGE 44

PAGE 45

PAGE 46

PAGE 47

PAGE 48

PAGE 49

PAGE 50

PAGE 51

PAGE 52

PAGE 53

PAGE 54

PAGE 55

PAGE 56

PAGE 57

PAGE 58

PAGE 59

PAGE 60

PAGE 61

PAGE 62

PAGE 63

PAGE 64

PAGE 65

PAGE 66

PAGE 67

PAGE 68

PAGE 69

PAGE 70

PAGE 71

PAGE 72

PAGE 73

PAGE 74

PAGE 75

PAGE 76